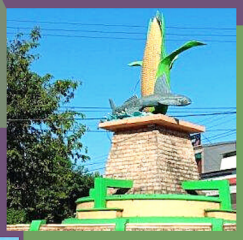
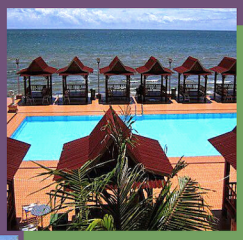
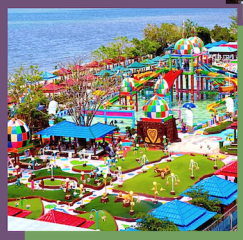
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

KABUPATEN TAKALAR



(0418) 21116

pemkab@takalarkab.go.id

www.takalarkab.go.id

Jln. Jend Sudirman No. 26 Takalar

TAKALAR

#bangga melayani bangsa

BUPATI TAKALAR
KATA PENGANTAR



Pj. BUPATI TAKALAR
Dr.SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Takalar dapat disusun tepat waktu. Laporan Kinerja ini disusun sebagai komitmen pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bersih, terbuka, akuntabel serta bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Walapun masa jabatan Bupati Takalar terdahulu telah berakhir pada tanggal 22 Desember 2022 namun kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja tetap kami laksanakan sebagai wujud pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Takalar atas perjanjian kinerja dan pencapaian sasarannya serta keterkaitannya dengan penggunaan

anggaran untuk mendukung berbagai kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022.

Semoga Laporan Kinerja Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Takalar ini dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) menuju ke pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pada tahap berikutnya.

Sebagai Pj. Bupati Takalar saya mengucapkan Terimas Kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Takalar dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Laporan Kinerja ini. Kritik, saran dan rekomendasi yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak dalam mewujudkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Takalar, Maret 2023

Pj. BUPATI TAKALAR

Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Gambaran Umum Daerah 3
D. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi 29
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
A. RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 32
B. Perjanjian Kinerja 41
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja 43
B. Analisis Capaian Kinerja 49
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran 103
D. Realisasi Anggaran 104
BAB IV PENUTUP 105

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara berkala.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dibuat sebagai perwujudan dari komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan akuntabel. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Aturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabiltas kinerja yang utuh yang dibuat dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja merupakan rangkuman penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka waktu satu tahun berupa bentuk pertanggung jawaban atas keseluruhan proses kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan laporan ini dilandaskan suatu niat yang tulus untuk mewujudkan *Good Governance*, yakni suatu tatanan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel. *Good Governance* sebuah organisasi khususnya organisasi pemerintahan sanagt ditentukan oleh

tingkat akuntabiltas pelaporan pada semua tingkatan organisasi. Terdapat beberapa masalah sering muncul dalam upaya mewujudkan hal tersebut, diantaranya adalah delegasi wewenang yang tidak jelas, indikator kinerja yang tidak terukur atau tidak sesuai dengan rencana strategis, terlalu banyaknya tujuan organisasi uang akan dicapai dan kadangkala tidak konsisten, perundang undangan yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan tujuan organisasi, serta tidak adanya pemisah yang jelas antara kesuksesan dan kegagalan.

Proses penyusunan LKJ Kabupaten Takalar dilakukan melalui tahapan pengumpulan data kinerja kegiatan masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Takalar yang berisi indikator kinerja, satuan indikator, serta rencana dan realisasi kegiatan. Selanjutnya menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara membandingkan realisasi dan target. Langkah akhir dari proses penysunan LKJ adalah melakukan analisis atas capaian kinerja kegiatan dan sasaran untuk kemudian dilakukan evaluasi atas masing – masing capaian indikator kinerja yang telah diukur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) memiliki dua fungsi utama yaitu: Pertama, Laporan Kinerja merupakan sarana pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Takalar atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2020 dan kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Takalar adalah sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan pertangung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar selain sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, LKj diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Takalar untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat diseluruh Kabupaten Takalar;
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Takalar yang akuntabel, sehingag berperan secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar yang lebih baik kepada masyarakat;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran Pemerintah Kabupaten Takalar.

Proses penyusunan LKj Kabupaten Takalar dilakukan melalui tahapan pengumpulan data kinerja kegiatan masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Takalar yang berisi indikator kinerja, satuan indikator serta rencana dan realisasi kegiatan. Selanjutnya, menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara membandingkan realisasi dan target. ;angkah akhir dari proses penyusunan LKj adalah melakukan analisis atas capaian kinerja kegiatan dan sasaran untuk kemudian dilakukan evaluasi atas masing-masing capaian indikator kinerja yang diukur.

C. GAMBARAN UMUM DAERAH

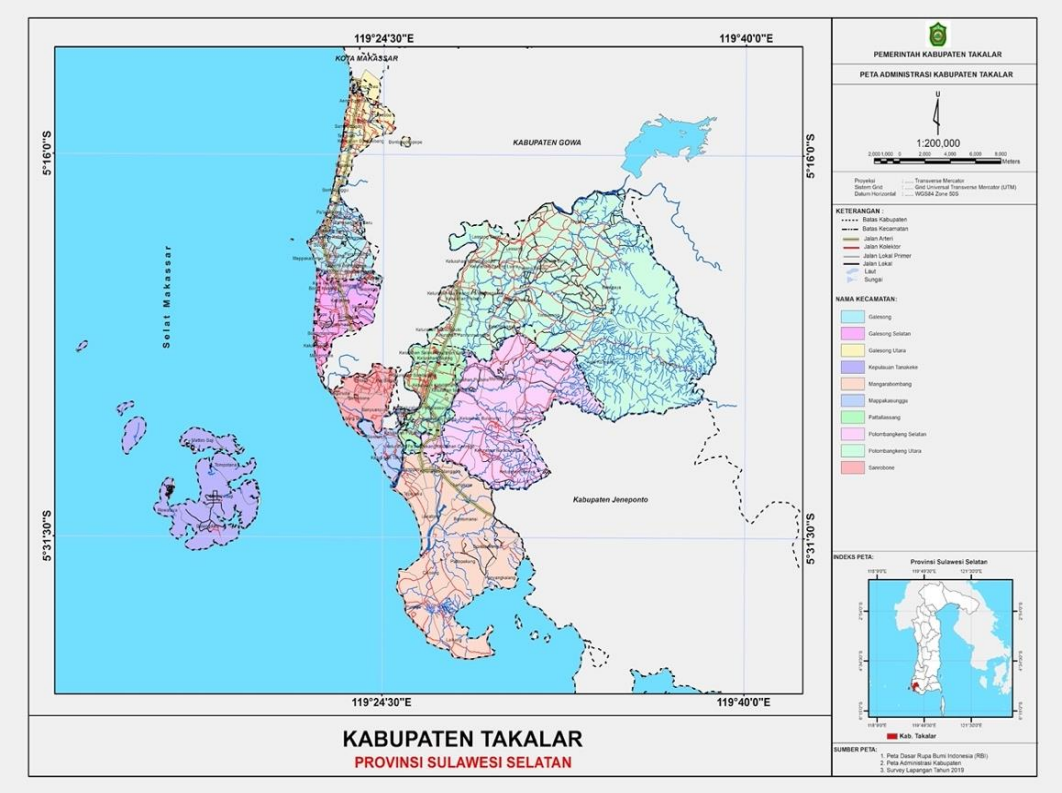
1. Aspek Geografi dan Demografi

1.1. Letak Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Di dalam kebijakan penataan ruang nasional (PP. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN) seluruh wilayah Kabupaten Takalar masuk dalam

KSN Perkotaan Mamminasata bersamaan dengan kawasan perkotaan Maros, Kota Makassar, perkotaan Sungguminasa dan perkotaan Takalar (ibukota kabupaten Pattalassang).

Gambar I.1.
Peta Administrasi Kabupaten Takalar



Sumber : Draft RTRW Kabupaten Takalar 2021 - 2041

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Takalar terletak antara 5030' – 5038' Lintang Selatan dan 119022' – 119039' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores.

Sesuai Permendagri No. 56 tahun 2015 tentang luas wilayah administratif, maka Kabupaten Takalar dengan ibukota Pattallassang memiliki luas wilayah 56.651 ha atau 566,61 Km2 atau sekitar 1,24% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluas 45.764,53 Km2. Adapun jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota

Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa.

Secara administratif, Kabupaten Takalar terdiri atas 10 (Sepuluh) wilayah kecamatan, 100 Desa/Kelurahan yang terdiri atas 76 (tujuh puluh enam) desa dan 24 kelurahan yang terdiri dari 465 (331 dusun dan 113 lingkungan). Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Polongbangkeng Utara (212,25 km2), dan yang paling sempit adalah Galesong Utara (15,11 km2). Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Polongbangkeng Utara (12 desa dan 6 kelurahan), sedangkan Kecamatan dengan Desa/Kelurahan paling sedikit adalah Sanrobone (6 desa). Kecamatan dengan Dusun/Lingkungan paling banyak adalah Polongbangkeng Utara, sedangkan Kecamatan dengan Dusun/Lingkungan yang paling sedikit adalah Sanrobone. Adapun pembagian wilayah administrasi Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel II-1.

Tabel I.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar Tahun 2021

No.	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Km2)	Persentase (%)
		Desa	Kel		
1.	Mangarabombang	11	1	100,50	17,74
2.	Mappakasunggu	3	1	15,12	2,67
3.	Sanrobone	6	-	29,46	5,18
4.	Polongbangkeng Selatan	4	6	88,07	15,54
5.	Pattallassang	-	9	25,31	4,47
6.	Polongbangkeng Utara	12	6	212,25	37,47
7.	Galesong Selatan	12	-	24,71	4,36
8.	Galesong	14	-	25,93	4,58
9.	Galesong Utara	9	1	15,11	2,67
10.	Kepulauan Tanakeke	5	-	30,15	5,32
Jumlah		76	24	566,51	100,0

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022

Berdasarkan tabel II-1 juga dapat dilihat bahwa Kecamatan dengan luas wilayah terbesar terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara yaitu seluas 212,25 Km2 atau 37,47% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Takalar, sementara Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu masing-masing Kecamatan Galesong Utara yaitu

seluas 15,11 Km2 (2,67%) dan Kecamatan Mappakasunggu yaitu seluas 15,12 Km2 (2,67%) dari total luas wilayah Kabupaten Takalar.

1.2. Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kabupaten Takalar berada pada ketinggian 0 – 1.000 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan bentuk permukaan lahan relatif datar, bergelombang hingga perbukitan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah dataran dan wilayah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 mdpl.

Tabel I.2.
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL)
Menurut Kacamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2021

No.	Kecamatan	Tinggi (meter)
1.	Mangarabombang	34
2.	Mappakasunggu	44
3.	Sanrobone	22
4.	Polongbangkeng Selatan	64
5.	Pattallassang	38
6.	Polongbangkeng Utara	41
7.	Galesong Selatan	22
8.	Galesong	32
9.	Galesong Utara	17
10.	Kepulauan Tanakeke	19

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2022

1.3. Geologi

Struktur geologi Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh formasi camba, terobosan, gunung api cindako, formasi tonasa dan endapan aluvium. Masing masing formasi batuan tersebut memiliki karakteristik yang membentuk struktur tanah dan batuan, antara lain :

1. Formasi Terobosan, terbentuk atas batuan basal
2. Formasi Camba terbentuk atas sendimen laut berselingan
3. Formasi Tonasa terbentuk atas batuan gamping
4. Formasi Gunung Api–Cindako, terbentuk atas batuan lava-breksi-tufa-konglomerat dan terutama lava
5. Endapan alivium dan pantai, terbentuk atas kerikil, pasir, lempung, dan lumpur

Jenis batuan atau geologi Kabupaten Takalar terdiri dari; Vulcanic (batuan Vulkanik), batuan ini merupakan batuan tertua yang telah mengalami perubahan, sebagian besar batu kapur terbentang sepanjang pantai perbatasan Takalar dengan Jeneponto. Gunung Api Baturape – Cindako merupakan batuan vulkanik basal yang terdiri dari lava dan batuan piroklastik yang bersilangan dengan tufa dan batu pasir. Batuan ini tersebar luas di wilayah pegunungan dan daerah dataran, Lapisan batuan ini memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah. Batuan Instrusif terdiri atas batuan basal mulai dari dolerit, diorit, gabbro hingga diabase.

1.4. Hidrologi

Secara Hidrologi, Kabupaten Takalar dilewati oleh 6 (enam) buah Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sungai Je'neberang, Sungai Pappa, Sungai Palleko, Sungai Je'netallasa, Sungai Pammukkulu dan Sungai Je'nemarrung. 4 (empat) diantara 6 (enam) sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha, yaitu Sungai Pappa, Sungai Palleko, Sungai Pammukkulu dan Sungai Je'nemarrung.

1.5. Klimatologi

Secara Klimatologi Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan November hingga bulan Mei. Jumlah curah hujan dan temperatur udara di Kabupaten Takalar selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel II-3.

Tabel I.3.
Jumlah Curah Hujan dan Rata-Rata Temperatur Udara
Di Kabupaten Takalar Tahun 2021

No	Bulan	Curah Hujan		Suhu/Temperature oC		
		Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Min	Rata-Rata	Max
1	Januari	839,3	30	22,8	27,2	31,2
2	Februari	397,0	20	23,2	27,5	31,9
3	Maret	626,3	23	22,7	27,8	32,6

4	April	294,0	11	23,2	28,5	32,2
5	Mei	78,1	11	23,4	29,4	34,0
6	Juni	87,0	14	22,4	28,8	34,5
7	Juli	77,3	9	20,5	28,3	34,0
8	Agustus	104,2	8	22,7	29,5	34,3
9	September	82,5	11	22,3	29,4	34,6
10	Oktober	245,4	17	23,6	29,0	33,5
11	November	542,0	26	23,6	28,3	32,6
12	Desember	860,3	28	23,0	27,7	32,6

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan tabel II-3 dapat dilihat bahwa jumlah curah hujan terbanyak tahun 2021 terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 860mm3 dan terjadi selama 28 hari. Temperatur udara terendah sebesar 20,5 derajat celcius pada bulan Juli dan tertinggi 34.5 derajat celcius pada bulan Juni.

1.6. Penggunaan Lahan

Kabupaten Takalar memiliki luas 566,51 km2. Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Takalar terdiri atas Tubuh Air (embung), Lahan Terbuka, Tambak, Semak Belukar, Rawa, Pertanian Lahan Basah, permukiman, Perkebunan, hutan dan beberapa jenis penggunaan lahan yang lainnya. Berdasarkan tabel berikut, bahwa penggunaan lahan terluas yaitu Pertanian Lahan Basah dengan luas 32.442,53 Ha sedangkan penggunaan lahan terkecil yaitu perkebunan seluas 15,45 Ha. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel I.4.
Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Takalar Tahun 2021

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Tubuh Air (Embung)	33,24	0,06
2	Lahan Terbuka	6.208,38	10,96
3	Tambak	2.916,78	5,15
4	Semak Belukar	11.880,70	20,97
5	Rawa	467,79	0,83
6	Pertanian Lahan Basah	32.442,53	57,27
7	Permukiman	903,19	1,59

8	Perkebunan	15,45	0,03
9	Hutan	1.506,26	2,66
10	Lainnya	276,67	0,49
Jumlah		56.651,00	100

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2022

1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan draft peraturan daerah Kabupaten Takalar tentang RTRW Kabupaten Takalar tahun 2020-2041, pola ruang kawasan budi daya direncanakan sesuai kemampuan lahan guna mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya. Pemanfaatan kawasan budi daya juga diarahkan dalam rangka mendukung terciptanya struktur ruang yang mendukung bagi pengembangan berbagai sektor pembangunan dan integrasi wilayah. Pengembangan kawasan budi daya di Kabupaten Takalar dilakukan secara efektif dan efisien serta sinergis, agar pemanfaatan ruang dan sumberdaya dapat dilakukan secara optimal. Berkenaan dengan itu, strategi pengembangan kawasan budi daya ditekankan pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Tabel I.5.
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2021

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan produksi berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 2.856 (dua ribu delapan ratus lima puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara.
2	Kawasan Pertanian	Kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 26.266 (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam) hektar berada di seluruh wilayah kecamatan. Kawasan tanaman pangan terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 18.457 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di





		Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Sanrobone.
		Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 4.266 (empat ribu dua ratus enam puluh enam) hektar berada di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Polongbangkeng Utara
3	Kawasan Perikanan	Kawasan perikanan dengan luas kurang lebih 4.186 (empat ribu seratus delapan puluh enam) hektar berada di Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Sanrobone.
4	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 3.561 (tiga ribu lima ratus enam puluh satu) hektar berada di Kecamatan Mangarabombang.
5	Kawasan Pariwisata	Kawasan pariwisata berada di Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dan Kecamatan Sanrobone.
6	Kawasan Permukiman	Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 5.112 (lima ribu seratus dua belas) terdapat di Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dan Kecamatan Sanrobone.
		Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 3.178 (tiga ribu seratus tujuh puluh delapan) terdapat di seluruh wilayah kecamatan
7	Kawasan Transportasi	Kawasan transportasi seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Galesong
8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan pertahanan dan keamanan berada di Kecamatan Galesong, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu,




		Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Sumber : Draft RTRW KabupatenTakalar Tahun 2021-2041

1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Takalar terletak di kaki Pulau Sulawesi dimana 40% wilayahnya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sepanjang 74 km. Kondisi topografis Kabupaten Takalar yang terdiri atas dataran rendah, perbukitan dan pesisir pantai, selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki po tensi rawan bencana khususnya banjir dan angin puting beliung. Semua kondisi tersebut akan menimbulkan risiko dan dampak kerawanan bencana baik banjir, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung (cuaca ekstrim), gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Takalar perlu melakukan upaya pengurangan risiko bencana guna meminimalisir dampak dari bencana-bencana yang berpotensi terjadi.

Tabel I.6.
Kejadian Bencana di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

No	Jenis Bencana	Lokasi	Luas Wilayah Terdampak	Waktu Kejadian
2017				
1	Banjir	4 Kecamatan	100 Ha	Desember
2	Puting Beliung	Dusun Campagaya Kec. Galesong	12 Rumah	Desember
2018				
1	Puting Beliung	Galesong Utara	68 Rumah	September s/d Desember
3	Gelombang Pasang/ Abrasi	Sampulungan Galesong Utara	1 Rumah	Desember
2019				
1	Banjir	7 Kecamatan	800 Ha	Januari
2	Puting Beliung	Polongbangkeng Utara dan	41 Rumah	Januari, Maret,

No	Jenis Bencana	Lokasi	Luas Wilayah Terdampak	Waktu Kejadian
		Mangarabombang		November
3	Gelombang Pasang/ Abrasi	Galesong	3 Rumah	Januari
4	Kekeringan	Mangarabombang	1 Kecamatan	Agustus
2020				
1	Puting Beliung	Galesong Utara	15 Rumah	Januari, Februari, November dan Desember
2021				
1	Banjir	**	**	**
2	Puting Beliung	**	**	**
3	Gelombang Pasang/ Abrasi	**	**	**
4	Kekeringan	**	**	**

Sumber : Website Data Informasi Bencana Indonesia, 2021
** : Tidak ada kejadian

Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatat bahwa Kabupaten Takalar pernah mengalami kejadian bencana seperti banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kekeringan. Bencana cuaca ekstrim merupakan bencana yang paling sering terjadi dengan tingkat kerusakan rumah dari sedang sampai tinggi. Sedangkan jumlah pengungsi yang terbanyak ada pada bencana banjir. Data dari DIBI menunjukkan kejadian yang sudah pernah terjadi di Kabupaten Takalar dan tidak menutup kemungkinan Kabupaten Takalar masih menyimpan potensi bencana yang lain.

Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Takalar adalah kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana abrasi pantai (Kecamatan Mappakasunggu dan Kecamatan Mangarabombang) dan banjir (pada dataran rendah Sungai Gamanti dan Sungai Pappa), kawasan perbukitan dan perkebunan rentan dengan bahaya longsor di kemiringan > 40% terletak di Kecamatan Polombangkeng Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Bungaya

Kabupaten Gowa dan Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

Dampak dari kejadian bencana tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis pasca bencana. Menyikapi tingginya potensi risiko bencana, Kabupaten Takalar membutuhkan sebuah Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Optimalitas perencanaan penanggulangan bencana tersebut dapat dilakukan melalui pelibatan setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, serta pengintegrasian RPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar. Proses ini diperlukan agar dapat memastikan RPB yang telah dibuat menjadi bagian dari rencana induk pembangunan Kabupaten Takalar secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi dasar untuk upaya penanggulangan bencana, meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi terkait Penanggulangan Bencana (PB) di Kabupaten Takalar, serta membangun dasar yang kuat untuk penyelenggaraan PB.

Analisis bahaya bencana disusun berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Takalar dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Pendekatan ini menghasilkan tingkat/kelas bahaya bencana di setiap potensi bencana yang kemudian disajikan dalam bentuk spasial. Kajian bahaya suatu kawasan diperoleh berdasarkan analisis indeks bahaya untuk setiap potensi bencana. Indeks bahaya yang merupakan dasar penentuan kategori kelas bahaya diperoleh dari parameter-parameter penentu bahaya dengan melalui proses tumpang susun (overlay) menggunakan pendekatan SIG (Sistem Informasi geografi). Analisis tumpang susun menggunakan metode berbobot tertimbang yaitu Scoring. Potensi bencana diperoleh dari sejarah kejadian dan

kemungkinan terjadi suatu bencana di kawasan tersebut. Dari potensi bencana yang ada, maka dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi di kawasan tersebut.

Kajian bahaya di Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) jenis bencana yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim (angin puting beliung), gempabumi, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami. Pengkajian bahaya yang dilakukan untuk seluruh potensi bencana berpedoman pada metodologi bahaya untuk memperoleh kelas bahaya dan peta bahaya yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Skala indeks bahaya dibagi dalam 3 (tiga) kelas bahaya yaitu:

- Rendah (0 - 0,333);
- Sedang (0,333 - 0,666); dan
- Tinggi (0,666 - 1).

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Metode kajian bahaya banjir yang digunakan adalah metode GFI (Geomorphic Flood Index) yang merupakan pendekatan untuk melihat wilayah rawan dan potensi banjir berdasarkan parameter geomorfologi di wilayah tersebut. Peta yang dihasilkan akan menggambarkan wilayah yang berpotensi tergenang air apabila faktor penyebab banjir terjadi seperti air sungai meluap, air laut pasang, dan hujan dengan intensitas tinggi dalam periode waktu yang lama. Adapun luasan bahaya bencana banjir di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel I.7.
Bahaya Bencana Banjir Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Mangarabombang	3.410.38	4.607.78	1.272.64	9.290.80
2.	Mappakasunggu	24.73	652.18	251.40	928.31
3.	Sanrobone	227.64	1.204.51	222.89	1.655.03
4.	Polongbangkeng Selatan	2546.74	4.409.52	637.48	7.593.74
5.	Pattallassang	375.16	2.027.91	282.71	2.685.77
6.	Polongbangkeng Utara	6.446.43	5.539.37	642.44	1.2628.24
7.	Galesong Selatan	430.46	1.532.29	227.37	2.190,12
8.	Galesong	299,26	1.627.45	231.25	2.157,96
9.	Galesong Utara	619.43	1.070.27	105.32	1.795.02
10	Kepulauan Tanakeke	1.114.34	2.192.23	490.98	3.797.56
Total		15.494.58	24.863.51	43.64.47	44.722.55
Persentase (%)		34.65	55.60	9.76	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana banjir di Kabupaten Takalar sebesar 44.722,55 Ha dan didominasi kelas bahaya sedang dengan luas 24.863,51 Ha atau 55,60 persen. Sedangkan bahaya bencana banjir dengan kelas bahaya tinggi sebesar 4.364,47 Ha atau 9,76%.

Bencana banjir merupakan ancaman bagi penduduk beserta aktivitasnya sehingga perlunya Pemerintah Kabupaten Takalar menyiapkan penanggulangan bencana banjir yang dapat dilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum banjir (prevention), penanganan saat banjir (response/intervention), dan pemulihan setelah banjir (recovery). Tiga Tahapan tersebut berada dalam suatu siklus kegiatan penanggulangan banjir yang berkesinambungan. Pemetaan terhadap bencana banjir juga sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana.

1.8.1. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba dengan volume air yang besar selama periode waktu yang singkat. Banjir bandang biasanya terjadi di hulu sungai

yang mempunyai alur sempit. Penyebab banjir bandang antara lain hujan yang lebat dan runtuhnya bendungan air. Pemetaan banjir bandang ini dilakukan dengan melihat alur sungai yang berpotensi tersumbat oleh longsor di hulu sungai. Adapun luasan bahaya bencana banjir bandang di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.8.
Bahaya Bencana Banjir Bandang Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Pattallassang	14.36	61.91	120.21	196.48
2.	Polongbangkeng Selatan	54.92	280.99	756.07	1091.98
3.	Polongbangkeng Utara	194.85	575.10	906.98	1676.93
Total		264.13	918.00	1.783.26	2.965.39
Persentase (%)		8.91	30.96	60.14	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

1.8.2. Cuaca Ekstrim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, cuaca ekstrim atau angin puting beliung didefinisikan sebagai angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Sedangkan dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor: Kep. 009 Tahun 2010 disebutkan, angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar yang keluar dari awan cummulonimbus dengan kecepatan lebih dari 34,8 knots atau 64,4 km/jam dan terjadi dalam waktu yang singkat. Angin puting beliung merupakan fenomena atmosfer dapat terjadi ketika faktor-faktor pembentuknya terpenuhi seperti adanya wilayah tekanan udara rendah yang dikelilingi oleh daerah bertekanan udara tinggi sehingga terbentuk siklon. Adapun

luasan bahaya bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.9.
Bahaya Bencana Cuaca Ekstrim Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Sedang	Total (Ha)
1.	Mangarabombang	9.302.16	9.302.16
2.	Mappakasunggu	918.02	918.02
3.	Sanrobone	1.643.14	1.643.14
4.	Polongbangkeng Selatan	8.650.77	8.650.77
5.	Pattallassang	2.699.34	2.699.34
6.	Polongbangkeng Utara	21.973.31	21.973.31
7.	Galesong Selatan	2.220.02	2.220.02
8.	Galesong	2.187.85	2.187.85
9.	Galesong Utara	1.834.52	1.834.52
10	Kepulauan Tanakeke	4.120.07	4.120.07
	Total (Ha)	55.549.21	55.549.21

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

1.8.3. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Adapun luasan bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel I.10.
Bahaya Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya		Total (Ha)
		Sedang	Tinggi	
1.	Mangarabombang	528.70	183.06	711.76
2.	Mappakasunggu	79.66		79.66
3.	Sanrobone	99.15		99.15
4.	Galesong Selatan	146.05		146.05
5.	Galesong	107.35		107.35
6.	Galesong Utara	286.40		286.40
7.	Kepulauan Tanakeke	258.51	143.33	401.84
Total (Ha)		1.505.82	326.39	1.832.21
Presentase (%)		82.18	17.81	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Takalar sebesar 1.832,21 Ha dan didominasi kelas bahaya sedang dengan luas 1.505,82 Ha atau 8 2 , 1 8 persen. Sedangkan untuk kelas bahaya tinggi dengan luas 326,39 Ha atau 17,81 persen.

1.8.4. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunungapi atau runtuhan batuan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Adapun luasan bahaya bencana gempabumi di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel I.1.
Bahaya Bencana Gempa Bumi Per kecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Sedang	Total (Ha)
1.	Mangarabombang	9.373.93	9.373.93
2.	Mappakasunggu	928.81	928.81
3.	Sanrobone	1.652.49	1.652.49
4.	Polongbangkeng Selatan	8.650.77	8.650.77

5.	Pattallassang	2.699.34	2.699.34
6.	Polongbangkeng Utara	2.1973.32	2.1973.32
7.	Galesong Selatan	2.220.31	2.220.31
8.	Galesong	2.189.34	2.189.34
9.	Galesong Utara	1.840.40	1.840.40
10	Kepulauan Tanakeke	4.226.34	4.226.34
Total (Ha)		55.755.05	55.755.05

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana gempa bumi di Kabupaten Takalar sebesar 55.755,05 Ha dengan kelas bahaya sedang.

1.8.5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Adapun luasan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.12.
Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan Di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Tinggi	Total (Ha)
1.	Polongbangkeng Selatan	81.34	81.34
2.	Polongbangkeng Utara	4.260.97	4.260.97
Total (Ha)		4.342.31	4.342.31

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Takalar sebesar 4.342,31 Ha dengan kelas bahaya tinggi.

1.8.6. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan

ekonomi dan lingkungan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal dalam terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisa untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun luasan bahaya bencana kekeringan di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.13.

Bahaya Bencana Kekeringan Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Sedang	Total (Ha)
1.	Mangarabombang	9.425.26	9.425.26
2.	Mappakasunggu	938.24	938.24
3.	Sanrobone	1.666.08	1.666.08
4.	Polongbangkeng Selatan	8.650.77	8.650.77
5.	Pattallassang	2.699.34	2.699.34
6.	Polongbangkeng Utara	2.1973.32	2.1973.32
7.	Galesong Selatan	2.220.31	2.220.31
8.	Galesong	2.220.31	2.220.31
9.	Galesong Utara	1.840.40	1.840.40
10	Kepulauan Tanakeke	4.225.44	4.225.44
Total (Ha)		55.825.39	55.825.39

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

1.8.7. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Peta zona gerakan tanah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah rawan longsor. Kondisi

lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Adapun luasan bahaya bencana tanah longsor di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.14.
Bahaya Bencana Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Polongbangkeng Selatan	6.97	186.13	3.34	196.44
2.	Polongbangkeng Utara	76.66	4.263.16	1.962.84	6.302.66
Total (Ha)		83.62	4.449.29	1.966.18	6.499.10
Presentase (%)		1.29	68.46	30.25	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana tanah longsor di Kabupaten Takalar sebesar 6.449,10 Ha dan didominasi kelas bahaya sedang dengan luas 4.449.29 Ha atau 6 8 , 4 6 persen. Sedangkan untuk kelas bahaya tinggi dengan luas 1.966,18 Ha atau 3 0 , 2 5 persen.

1.8.8. Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempabumi (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Adapun luasan bahaya bencana tsunami di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.15.
Bahaya Bencana Tsunami Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Ringan	Sedang	Tinggi	
1.	Mangarabombang	621.56	455.61	2.320.52	3.397.69
2.	Mappakasunggu	38.63	36.38	799.03	874.04
3.	Sanrobone	208.26	130.35	929.65	1.268.26
4.	Polongbangkeng	3.86			3.86

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Ringan	Sedang	Tinggi	
	Selatan				
5.	Pattallassang	74.76	13.32	18.79	106.87
6.	Polongbangkeng Utara				
7.	Galesong Selatan	219.80	111.99	260.38	592.17
8.	Galesong	65.68	35.15	126.32	227.15
9.	Galesong Utara	222.44	143.43	298.05	663.92
10	Kepulauan Tanakeke	1.348.87	423.95	767.82	2.540.64
Total (Ha)		2.803.86	1.350.18	5.520.57	9.674.61
Presentase (%)		28.98	13.96	57.06	100

Sumber :Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 9 Kecamatan di Kabupaten Takalar yang berpotensi terdampak bahaya bencana tsunami dengan luasan sebesar 9.674,61 Ha dan didominasi kelas bahaya tinggi dengan luas 5.520,57 Ha atau 57,06 persen.

1.8.9. Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Takalar terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk per tahun selama periode 2017-2021 sebesar 1.05%. Berdasarkan Kecamatan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada wilayah Kecamatan Sanrobone dan Galesong Utara dengan nilai laju pertumbuhan penduduk masing masing sebesar 1,34% per tahun dan terendah terjadi pada wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke dan Mappakasunggu yaitu masing masing sebesar 0.78. Sebagai catatan bahwa Kepulauan Tanakeke adalah Kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2019.

Tabel I.16.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Laju Pert. Penduduk (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Mangarabombang	38.913	39.156	39.378	41.085	42.916	1,08
2	Mappakasunggu	16,129	16.239	16.343	9.461	9.936	0,78
3	Sanrobone	14.048	14.130	14.206	15.257	16.319	1,34
4	Polongbangkeng Selatan	28.494	26.690	28.871	29.237	29.807	0,84
5	Pattallassang	38.975	39.551	40.119	39.275	40.160	1,18
6	Polongbangkeng Utara	49,797	50.290	50.762	50.255	51.372	0,88
7	Galesong Selatan	25.936	26.194	25.443	26.985	28.210	1,.19
8	Galesong	40.962	41.421	41.865	41.003	42,873	0,88
9	Galesong Utara	39.729	40.221	40.701	41.311	42.174	1,34
10	Kepulauan Tanakeke	*	*	*	6.984	7.395	0,78
Takalar		292.983	295.892	298.688	300.853	311.162	1,05

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, 2022

Tabel II-16 menunjukkan sebaran kepadatan penduduk tidak merata dan hanya terfokus pada 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Polongbangkeng Utara, Mangarabombang, Pattallassang, Galesong dan Galesong Utara. Kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 2.791 jiwa/km2 terdapat diwilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yaitu Kecamatan Galesong Utara. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Jika dilihat dari besaran jumlah penduduk maka Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan juga merupakan Kecamatan terluas yang ada dalam wilayah Kabupaten Takalar.

Tabel I.17.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
Kabupaten Takalar Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	% Penduduk	Jumlah Penduduk (Org)	Kepadatan Penduduk (Org/ Km2)
1.	Mangarabombang	100,50	13,72	42.916	427
2.	Mappakasunggu	15,12	3,23	9.936	657
3.	Sanrobone	29,36	5,25	16.319	556
4.	Polongbangkeng Selatan	88,07	9,63	29.807	338
5.	Pattallassang	25,31	13,03	40.160	1.587
6.	Polongbangkeng Utara	212,25	16,56	51.372	242
7.	Galesong Selatan	24,71	9,00	28.210	1.142
8.	Galesong	25,93	13,70	42,873	1.653
9.	Galesong Utara	15,11	13,55	42.174	2.791
10.	Kepulauan Tanakeke	30,15	2,33	7.395	245
Takalar		566,51	100,00	311.162	549

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2021), data diolah

Populasi penduduk terbanyak terdapat pada kelompok umur 5 – 9 Tahun yaitu sebanyak 29.128 jiwa atau 9,58% dari total penduduk Kabupaten Takalar sementara populasi penduduk terkecil terdapat pada kelompok umur 60 – 64 tahun yaitu sebanyak 11.384 jiwa atau 3,74% dari total jumlah penduduk Kabupaten Takalar tahun 2019.

Tabel I.18.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Takalar Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persen	Rasio JK (L/P)
		LK	PR			
1	0-4	12.848	12.119	24.967	8,02	1,06

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persen	Rasio JK (L/P)
		LK	PR			
2	5-9	15.024	14.018	29.042	9,33	1,07
3	10-14	14.721	13.760	28.481	9,15	1,07
4	15-19	11.754	11.960	23.714	7,62	0,98
5	20-24	12.989	13.068	26.057	8,37	0,99
6	25-29	12.461	12.467	24.928	8,01	1,00
7	30-34	11.403	11.469	22.872	7,35	0,99
8	35-39	11.182	12.144	23.326	7,50	0,92
9	40-44	10.126	11.469	21.595	6,94	0,88
10	45-49	10.118	11.316	21.434	6,89	0,89
11	50-54	9.107	10.008	19.115	6,14	0,91
12	55-59	6.765	8.112	14.877	4,78	0,83
13	60-64	5.390	6.124	11.514	3,70	0,88
14	65-69	3.392	4.004	7.396	2,38	0,85
15	70-74	1.888	2.605	4.493	1,44	0,72
16	>=75	2.693	4.658	7.351	2,36	0,58
Takalar		151.861	159.301	311.162	100,00	0,95

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2021), data diolah

Tabel II.18 Menunjukan bahwa berdasarkan jenis kelamin, sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Takalar jumlah penduduk laki laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan dengan besaran rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 0.95. Berdasarkan kelompok umur dapat dilihat bahwa pada kelompok umur tertentu, jumlah penduduk laki laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin diatas 1,0 terdapat pada kelompok umur 0 – 14 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun dan kelompok umur 25 – 29 tahun.

1.8.10. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan social. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang

mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, diantaranya adalah :

Angka kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Takalar pada periode 2017 - 2021 mengalami penurunan tiap tahunnya, Tahun 2017 sebesar 9,24% (26,990 jiwa), turun menjadi 9% (26.570 jiwa) pada Tahun 2018. Selanjutnya kembali mengalami penurunan pada Tahun 2019 menjadi 8,70% (25.930 jiwa), tahun 2020 menjadi 8,44% (25.380 jiwa) dan tahun 2021 juga menurun menjadi 8,25% (24.600 jiwa). Angka kemiskinan di Kabupaten Takalar menunjukkan tren yang menurun dalam kurun waktu 2017-2021. Peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sampai ke Pemerintah Desa sangat mendukung penurunan angka kemiskinan. Berbagai program dan kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat menekan peningkatan angka kemiskinan. Diantaranya Dana desa yang dialokasikan sejak tahun 2015 dan berbagai program social lainnya, dan Alokasi anggaran penanganan Covid 19 Tahun 2020 dalam bentuk Bantuan Sosial dan Pemulihan Ekonomi masyarakat.

Tabel I.19.
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/capital/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2017	299.721	26,99	9,24
2018	335.989	26,57	9,00
2019	356.973	25,93	8,70
2020	364.378	25,38	8,44
2021	380.564	24,60	8,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2021

Pertumbuhan Ekonomi Salah satu cara untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu daerah yakni dengan mencermati nilai dan pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Dari Tabel II-20 nampak bahwa PDRB atas dasar harga berlaku berkembang rata rata jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini dikarenakan PDRB atas dasar harga berlaku dipengaruhi oleh harga pada tahun berjalan.

Tabel I.20.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

No	Tahun	PDRB adh berlaku (milyar Rp.)	PDRB adh konstan (milyar Rp.)	Perkembangan (persen)
1	2017	7.750,36	5.405,32	9,61
2	2018	8.559,00	5.803,94	7,37
3	2019	10.157,35	6.616,25	6,87
4	2020	10.220,31	6.575,76	-0,61
5	2021	11.162,00	**	5,05
Rata-rata		9.201,98	6.118,39	5,98

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2021

Bila diperhatikan selama periode 2017-2021, perekonomian Kabupaten Takalar relatif stabil sampai dengan Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan 7,63 persen per tahun, namun pada Tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup besar dengan pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang negative yakni sebesar -0,61 persen sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi sampai dengan Tahun 2020 menjadi 5,98 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 meningkat menjadi





5,05 persen namun masih berada dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 6,71 persen. Tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 masih disebabkan terjadinya pandemi covid-19. Hal ini tidak terlepas dari pemberlakuan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus, yang mengubah secara fundamental cara manusia dalam bersosialisasi; hal lainnya adalah dampak dari pandemi covid-19 juga mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja, sehingga ada pemerosotan dalam aktivitas perekonomian di Kab. Takalar khususnya di bidang pariwisata;

Jika di lihat dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar sedikit mengalami perlambatan, pada Tahun 2017 tumbuh sekitar 9,61 persen, kemudian mengalami kontraksi menjadi 7,37 persen pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan menjadi 6,87 persen. Namun pada Tahun 2020 kontraksinya cukup dalam dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,61 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang negative, maka dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah memukul pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar. Meskipun ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan, sebagian besar sektor mengalami kontraksi. Namun demikian, angka tersebut belum dapat menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka ini hanya merupakan angka rata-rata dari semua penduduk. Dengan kata lain, selain indikator ini juga harus dilihat bagaimana distribusi pendapatan di daerah tersebut.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Sulawesi Selatan, maka pertumbuhan ekonomi Takalar merupakan salah satu daerah yang cukup tinggi pertumbuhannya dengan rata-rata 7,63% sebelum



mengalami kontraksi yang cukup dalam pada Tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar -0,61%, namun masih lebih baik dari pertumbuhan Sulawesi Selatan yang mengalami kontraksi sampai -0,70% serta pertumbuhan nasional yang mengalami kontraksi sampai -2,07%.

D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 dan ditetapkan pada tanggal 10 Februari 1960. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan Pattallassang sebagai ibu kota Kabupaten Takalar. Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nonor 7 Tahun 1990 menetapkan tanggal 10 Februari 1960 sebagai Hari jadi Kabupaten Takalat yang kemudian setiap tahun diperingati.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, maka pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Takalar telah melaksanakan penyesuaian sesuai dengan aturan baru tersebut penataan organisasi melalui proses pemetaan urusan wajib dan urusan pilihan melalui proses verifikasi dan validasi oleh masing-masing kementerian urusan pemerintahan dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur, dari hasil proses verifikasi dan validasi data akan menentukan tipe dari organisasi. Namun masih ada perangkat daerah yang tidak memiliki tipe dan mengenai pemberian tipe menunggu regulasi dan petunjuk teknis selanjutnya dari pusat.

Pada tahun 2022 ini berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar kembali mengalami perubahan dengan penggabungan dan pembentukan perangkat daerah baru yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten

Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun perubahan jumlah, nama dan tipe Perangkat Daerah dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel I.21.
Jumlah dan Nomenklatur OPD Pemerintah Kabupaten Takalar

NO	Nama OPD	Tipe
1.	Sekretariat Daerah	B
2.	Sekretariat DPRD	C
3.	Inspektorat	B
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A
5.	Dinas Kesehatan	A
6.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A
7.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	A
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	A
12.	Dinas Perhubungan	B
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B
16.	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	B
17.	Dinas Perikanan	B
18.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	A
19.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	A
20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A
21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	A
22.	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	B
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A
26.	Badan Pendapatan Daerah	A
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A
28.	Kecamatan Pattallassang	A
29.	Kecamatan Polongbangkeng Utara	A
30.	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	A
31.	Kecamatan Mangarabombang	A
32.	Kecamatan Mappakasunggu	A

33.	Kecamatan Sanrobone	A
34.	Kecamatan Galesong Selatan	A
35.	Kecamatan Galesong Utara	A
36.	Kecamatan Galesong	A
37.	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	B

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar (2022)

Kecamatan dan Kelurahan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Camat/Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kabupaten Takalar mempunyai 10 Kecamatan, 24 Kelurahan, 76 desa dan 11 desa persiapan.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022 berjumlah 4.623 orang.

Tabel I.22.
Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022

Golongan	Jumlah
Golongan I	15
Golongan II	493
Golongan III	2475
Golongan IV	1.640
Jumlah	4.623

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (2022)

Aparatur Sipil Negara yang berjumlah 4.186 orang di pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai Tingkat Pendidikan yang berbeda-beda yaitu : Sarjana, Magister, dan Doktor sebanyak 75.09%, Diploma III berjumlah 6.36%, Diploma II berjumlah 4.63%, SLTA berjumlah 13,06%, dan sisanya merupakan pegawai berpendidikan SLTP kebawah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMD KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2017-2022

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang akan substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabatan dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembagunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun sebagai agenda pembangunan yang menyatu dengan agenda pemerintah yang akan dilaksnakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama menjadi pimpinan pemerintahan. Oleh karena itu, RPJMD merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1. Visi dan Misi

Visi sekaligus tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN TAKALAR YANG UNGGUL, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT"

Adapun makna Visi Pembangunan diatas adalah :

a. **Takalar Unggul** : Manusia berkualitas dan unggul yang memiliki daya saing dalam menghadapi dinamika perubahan.
b. **Takalar Sejahtera** : Ekonomi rakyat yang sejahtera, iklim investasi yang terjamin, Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong perbaikan pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi beban hidup.
c. **Takalar Bermartabat** : Tatanan masyarakat yang agamis, tertib dan demokratis dan kepemerintahan yang baik dengan pelayanan yang memanusiakan sehingga tatanan kehidupan masyarakat berlangsung secara tertib dan tenteram berlandaskan nilai-nilai agama dan demokrasi.

Untuk mewujudkan visi diatas, Pemerintah Kabupaten Takalar mencanangkan misi. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenai Pemerintah Kabupaten Takalar dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam. Misi Pemerintah Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan produktifitas masyarakat yang berdaya saing tinggi**;

   Misi ini mencakup upaya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan amsyarakat.

2. **Meningkatkan pendapatan dan meringankan beban hidup masyarakat;**

   Misi ini mencakup upaya dalam meningkatkan produksi sektor-sektor perokonomian serta menurunkan beban hidup masyarakat miskin.

3. **Mewujudkan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan;**

   Misi ini mencakup upaya dalam perbaikan pelayanan dan iklim investasi.

4. **Mewujudkan pembangunan yang komprehensif berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis pada desa;**

   Misi ini mencakup upaya dalam pemeliharaan kualitas lingkungan hidup, penguatan desa dan penataan ruang.

5. **Mewujudkan kehidupan agamis yang damai dan toleran;**

   Misi ini mencakup upaya dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama, pemeliharaan ketertiban dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat.

6. **Menerapkan tata kelola pemerintahan yang aktif, bersih, akuntabel dan demokratis;**

   Misi ini mencakup upaya dalam reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik.

2. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan target Pemerintah Kabupaten Takalar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disertai dengan pencanangan visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan kemudian dilanjutkan dengan penetapan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pemerintah Kabupaten Takalar dapat dilihat sebagai berikut :





Tabel II.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Pemerintah Kabupaten Takalar.

Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2021	Target 2022
Tujuan 1 **Meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan, dan produktivitas masyarakat.**						
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.	1.	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	67,30	70,18
		2.	Angka Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	7,60	8,20
		3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.80	15,20
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,80	70,20
3.	Meningkatnya Produktivitas SDM Masyarakat	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,10%	2,00%
Tujuan 2 **Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat**						
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Masyarakat	1.	PDRB/ Kapita	Juta	40	40
		2.	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,54	7,54
2.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas sektor – sektor Perekonomian	1.	Kontribusi Pertanian, Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	7,76	7,81
		2.	Kontribusi Peternakan terhadap PDRB	%	9,46	9,81
		3.	Kontribusi Perikanan terhadap PDRB	%	13,51	13,76
		4.	Kontribusi Industri terhadap PDRB	%	6,24	6,29
		5.	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	9,84	9,89
3.	Berkurangnya beban hidup masyarakat lapis bawah	1.	Penduduk diatas garis kemiskinan	%	92	92,35
Tujuan 3 **Meningkatkan Kapasitas Investasi dan Kerjasama Pembangunan Daerah**						
1.	Meningkatnya realisasi investasi dan kerjasama pembangunan daerah	1.	Nilai Investasi PMDN	Jumlah	44.000.000.000	45.000.000.000
		2.	Nilai Investasi PMA	Jumlah	0	0








Tujuan 4 Memelihara Daya Dukung Lingkungan Bagi Keberlanjutan Pembangunan serta Penguatan Desa						
Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja		Satuan	Target	
					2021	2022
1.	Terpeliharanya daya dukung lingkungan bagi keberlanjutan pembangunan serta penguatan desa	1.	Penghargaan lingkungan hidup	Penghargaan	Adipura	Adipura
2.	Terpeliharanya daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam berbasis integrasi ruang	1.	Tingkat Kepatuhan terhadap RTRW	%	80	90
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan di desa/kelurahan	1.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6474	0,6474
Tujuan 5 **Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Permukiman dan Perumahan**						
Sasaran Kinerja		**Indikator Kinerja**		**Satuan**	**Target**	
					2021	**2022**
1.	Meningkatnya Kapasitas infrastruktur permukiman dan perumahan	1.	Persentase rumah layak huni	%	30	32
		2.	Persentase Permukiman Kumuh	%	10	8
Tujuan 6 **Meningkatkan Martabat Tatanan Sosial Kemasyarakatan**						
Sasaran Kinerja		**Indikator Kinerja**		**Satuan**	**Target**	
					2021	**2022**
2.	Meningkatnya kualitas ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat	1.	Persentase Angka Gangguan ketertiban dan ketentraman yang ditangani	%	98	98
		2.	Tingkat Waktu Tanggap	%	95	98
Tujuan 7 **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas**						
Sasaran Kinerja		**Indikator Kinerja**		**Satuan**	**Target**	
					2021	**2022**
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	A



	yang Efektif, bersih, akuntabel, demokratis dan terpercaya	2.	Nilai SAKIP	Nilai	BB	A
		3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	%	75	80
		2.	Capaian SPM Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban, Perumahan Pemukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	%	80	85

3) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Takalar

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Takalar ditetapkan dengan Peraturan Bupati Takalar Nomor 08.a Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Takalar yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2022

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL 2016/2017	TARGET KINERJA SASARAN				
			2020	2020	2020	2022	Kondisi Akhir 2022
1.	**Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Masyarakat Yang Berdaya Saing Tinggi**						
1.1	IPM (%)	65,48	66,19	67,06	67,20	67,30	70,18
1.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	6,77	7,20	7,25	7,40	7,60	8,20
1.3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.21	13.22	14.40	14.60	14.80	15.20
1.4	Angka Harapan Hidup (tahun)	66,38	67,20	68,40	68,60	68,80	70,20
1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93%	4,00%	3,5%	3%	2,10%	2,00%
2.	**Misi 2 : Meningkatkan Pendapatan dan Menurunkan Beban Hidup Masyarakat**						
2.1	PDRB/Kapita	29,75 Juta (2017)	32,75 juta	35,75 Juta	38,75 Juta	40 Juta	40 Juta
2.2	Pertumbuhan Ekonomi	7,39 (2017)	7,39	7,44	7,49	7,54	7,54
2.3	Kontribusi Pertanian Tanaman Pangan Terhadap PDRB	7,56 (2016)	7,61	7,66	7,71	7,76	7,81
2.4	Kontribusi Peternakan terhadap PDRB	8,16% (2016)	8,41	9,76	9,11	9,46	9,81
2.5	Kontribusi Perikanan terhadap PDRB	12,51% (2016)	12,76	13,01	13,26	13,51	13,76
2.6	Kontribusi Industri terhadap PDRB	5,94% (2016)	5,99	6,04	6,19	6,24	6,29
2.7	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	9,54%	9,69	9,74	9,79	9,84	9,89
2.8	Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	90,65% (2016)	90,95%	91,30%	91,65%	92%	92,35%

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL 2016/2017	TARGET KINERJA SASARAN				
			2020	2020	2020	2022	Kondisi Akhir 2022
3.	**Misi 3 : Mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, berkualitas dan berkelanjutan**						
3.1	Nilai Investasi PMDN	39.265.000.000	40.000.000.000	42.500.000.000	43.000.000.000	44.000.000.000	45.000.000.000
3.2	Nilai Investasi PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Sacara Komprehensif yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan yang berbasis pada Desa**						
4.1	Penghargaan lingkungan hidup	Piagam Adipura	Piagam Adipura	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura
4.2	Tingkat Kepatuhan terhadap RTRW	40%	50%	60%	70%	80%	90%
4.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						
4.4	Potensi Penurunan Emisi CRK (Juta Ton, CO,Eq)						
4.5	Indeks Desa Membangun	0,59986 (2015)	0,59986	0,6474	0,6474	0,6474	0,6474
4.6	Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air						
4.7	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.8	Persentase Rumah Layak Huni	21	24	25	28	30	32
4.9	Persentase Pemukiman Kumuh	18	16	14	12	10	8
5.	**Misi 5 : Mewujudkan kehidupan yang agamais, demokratis, aman dan tertib**						
5.1	Penanganan angka kriminalitas	90,62%	92%	93%	94%	95%	96%
5.2	Indeks Toleransi Kerukunan Beragama	-	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL 2016/2017	TARGET KINERJA SASARAN				
			2020	2020	2020	2022	Kondisi Akhir 2022
5.3	% Gangguan Ketertiban dan Ketentraman yang tertangani	97,22% (2017)	98%	98%	98%	98%	98%
5.4	Tingkat waktu tanggap	84,44% (2017)	85%	88%	90%	95%	98%
6.	**Misi 6 : Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Akuntabel, Demokratis, dan Terpercaya**						
6.1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	B	B	A
6.2	Nilai LAKIP/SAKIP	CC	B	BB	BB	BB	A
6.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WDP (2017)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
6.4	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	60%	65%	70%	75%	80%
6.5	Capaian SPM Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman).	N/A	65%	70%	75%	80%	85%

B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis kemudian dijabarkan pada kegiatan tahunan dalam bentuk perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Takalar Tahun 2022 dibuat berdasakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Takalar 2017-2022. Perjanjian kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang akan dicapai dalam satu periode pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator

kinerja, baik pada tingkat sasran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022 terdiri atas 14 Sasaran Strategis dan 27 Indikator Kinerja serta didukung dengan 149 Program pendanaan dari APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022 dapat dilihat pada lempiran 1 Laporan Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang diharapkan (target) dengan kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dan dilakukan secara berkala baik itu (triwulan) maupun tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel III.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Inteval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Nilai Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Hingga akhir tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Takalar telah melaksanakan target kinerja seperti yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pengukuran Kinerja yang memuat realisasi capaian kinerja sasaran strategis secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut :





Tabel III.2.
Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022

	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Kode
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat						
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,18	68,31	97,33	ST
2.	Angka Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	8,20	7,49	91,34	ST
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,20	12,42	81,71	T
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat						
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,20	67,30	95,86	ST
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Produktivitas SDM Masyarakat						
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,00	2,63	76,04	T
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Masyarakat						
1.	PDRB / Kapita	Juta	40	40,18	100,45	ST
2.	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,54	4,64	61,53	S
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor – Sektor Perekonomian						
1.	Kontribusi Pertanian, Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	7,81	10,20*	130,60*	ST
2.	Kontribusi Peternakan terhadap PDRB	%	9,81	3,6*	36,69*	SR
3.	Kontribusi Perikanan terhadap PDRB	%	13,76	N/A*	N/A*	N/A*
4.	Kontribusi Industri terhadap PDRB	%	6,29	4,81*	76,47*	T
5.	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	9,89	12,05*	121,84*	ST
Sasaran Strategis 6 Berkurangnya Beban Hidup Masyarakat Lapis Bawah						
1.	Penduduk diatas garis kemiskinan	%	92,35	98	106,11	ST
Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kerjasama Pembangunan Daerah						
1.	Nilai Investasi PMDN	Jumlah	45.000.000.000	97.525.785.650	216,72	ST
2.	Nilai Investasi PMA	Jumlah	0	0	100	ST







Sasaran 8 Terpeliharanya Daya Dukung Lingkungan bagi Keberlanjutan Pembangunan serta Penguatan Desa						
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Kode**
1.	Penghargaan Lingkungan Hidup	Penghargaan	Adipura	Tidak Ada	0	SR
Sasaran 9 Terpeliharanya Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berbasis Integrasi Ruang						
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Kode**
1.	Tingkat Kepatuhan terhadap RTRW	%	90	66,67	74,07	S
Sasaran 10 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan						
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Kode**
1.	Indeks Membangun Desa	Indeks	0,6474	0,6809	105,17	ST
Sasaran 11 Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Permukiman dan Perumahan						
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Kode**
1.	Rumah Layak Huni	%	32	35,59	108,63	ST
2.	Permukiman Kumuh	%	8	16,40	60,97	R
Sasaran 12 Meningkatnya Kualitas Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat						
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Kode**
1.	Persentase Gangguan Ketertiban, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat yang tertangani	%	98	100	102,04	ST
2.	Tingkat Waktu Tanggap	%	98	100	102,04	ST
Sasaran 13 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel, demokratis, dan terpercaya						
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Kode**
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	A (80-90)	CC (54,92)	68,65	S
2.	Nilai SAKIP	Nilai	A (80-90)	B (61,45)	76,81	T
3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	100	ST
Sasaran 14 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik						
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Kode**
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	%	80	56,75	70,93	S
2.	Capaian SPM Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sosial,	%	85	58,84	69,22	S



	Ketentraman dan Ketertiban, Perumahan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)					

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Capaian pengukur Indikator Kinerja Utama di Tahun 2022 dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel III.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2022**	**Sumber Data**
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,31	Takalar Dalam Angka 2023
2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar
Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2022**	**Sumber Data**
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,30	Dinas Kesehatan
Sasaran Strategis 3				
Meningkatnya Produktivitas SDM Masyarakat				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2022**	**Sumber Data**
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,63	Kabupaten Takalar Dalam Angka 2023 / Dinas Koperasi UKM Nakertrans





Sasaran Strategis 4				
Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Masyarakat				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2022**	**Sumber Data**
1.	PDRB / Kapita	Juta	40,18	Takalar Dalam Angka 2023
2.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	Takalar Dalam Angka 2023
Sasaran Strategis 5				
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor – Sektor Perekonomian				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2022**	**Sumber Data**
1.	Kontribusi Pertanian, Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	10,20	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.	Kontribusi Peternakan terhadap PDRB	%	3,6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.	Kontribusi Perikanan terhadap PDRB	%	N/A	Dinas Perikanan
4.	Kontribusi Industri terhadap PDRB	%	4,81	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Takalar
5.	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	12,05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran Strategis 6				
Berkurangnya Beban Hidup Masyarakat Lapis Bawah				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2022**	**Sumber Data**
1.	Penduduk diatas garis kemiskinan	%	98	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Takalar
Sasaran Strategis 7				
Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kerjasama Pembangunan Daerah				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2022**	**Sumber Data**
1.	Nilai Investasi PMDN	Jumlah	97.525.785.650	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Takalar
2.	Nilai Investasi PMA	Jumlah	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Takalar
Sasaran Strategis 8				







Terpeliharanya Daya Dukung Lingkungan Bagi Keberlanjutan Pembangunan Serta Penguatan Desa				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2022**	**Sumber Data**
1.	Penghargaan Lingkungan Hidup	Penghargaan	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Takalar
Sasaran Strategis 9				
Terpeliharanya Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berbasis Integrasi Ruang				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2022**	**Sumber Data**
1.	Tingkat Kepatuhan terhadap RTRW	%	66,67	Dinas PU, TR, PKP
Sasaran Strategis 10				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2022**	**Sumber Data**
1.	Indeks Membangun Desa	Indeks	0,6809	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Takalar
Sasaran Strategis 11				
Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Permukiman dan Perumahan				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2022**	**Sumber Data**
1.	Persentase Rumah Layak Huni	%	35,59	Dinas PU, TR, PKP
2.	Persentase Permukiman Kumuh	%	16,40	Dinas PU, TR, PKP
Sasaran Strategis 12				
Meningkatnya Kualitas Ketertiban, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2022**	**Sumber Data**
1.	Persentase Angka Gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat yang ditangani	%	100	Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kab. Takalar



2.	Tingkat Waktu Tanggap	%	100	Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kab. Takalar
Sasaran Strategis 13				
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, Demokratis dan Terpercaya				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2022**	**Sumber Data**
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC (54,92)	KemenPAN – RB Melalui Bagian Organisasi Setda Kab. Takalar
2.	Nilai SAKIP	Nilai	B (61,45)	KemenPAN – RB Melalui Bagian Organisasi Setda Kab. Takalar
3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	BPK melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Takalar
Sasaran Strategis 14				
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2022**	**Sumber Data**
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	%	56,75	Ombudsman RI
2.	Capaian SPM Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban, Perumahan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	%	58,84	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Takalar

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja dilakukan untuk melihat perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya serta sebagai proyeksi untuk target pencapaian kinerja di tahun akhir RPJMD. Analisis ini juga berfungsi untuk mencari tahu apa penyebab keberhasilan

ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja. Analisis pencapaian kinerja tahun 2022 untuk masing – masing sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.4.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,18	68,31	97,33
2	Angka Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	8,20	7,49	91,34
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,20	12,42	81,71

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 pada tabel diatas, dari 3 indikator kinerja, 2 Indikator Kinerja dapat mencapai kriteria sangat tinggi (ST) dan 1 Indikator Kinerja mencapai kriteria tinggi (T).

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
1.	Indeks Pembangunan Manusia	67,31	67,72	68,31
2.	Angka Rata – Rata Lama Sekolah	7,29	7,49	7,49
3.	Harapan Lama Sekolah	12,41	12,42	12,42

Berdasarkan tabel perbandingan capaian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dari ketiga indikator pada sasaran 1 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat, tiap tahunnya mengalami peningkatan hanya untuk Indikator ke Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah yang masih stagnan di capaian yang sama dengan tahun 2021.

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan RPJMD.

Tabel. III.6

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,18	68,31	97,33
2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,20	7,49	91,34
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,20	12,42	81,71

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir RPJMD 2017-2022 sehingga target tahun 2022 merupakan kondisi akhir yang diharapkan sesuai dengan RPJMD. Berdasarkan tabel diatas untuk Sasaran 1 terdapat 2 (dua) Indikator yang capaiannya Sanga Tinggi (ST) yaitu Indikator Indeks Pembangunan Manusia 97,33% dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah 91,34% sedangkan untuk indikator Harapan Lama Sekolah 81,71% dengan kategori capaian Tinggi (T).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka yang menggambarkan keadaan tentang tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduk secara umum. Dengan melihat peningkatan IPM, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, tampak kemajuan yang dicapai Kabupaten Takalar dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan.

Angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Takalar merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan

untuk melihat kualitas penduduk Kabupaten Takalar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.



Foto : Bupati Takalar Dr. H. Syamsari, S.Pt, MM menerima pengharagaan Sekolah Ramah Anak (Disdikbud 2022)

Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Berdasarkan rata-rata ketiga indeks yang menjadi penyusun IPM, diperoleh nilai IPM Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sebesar 66,67, Tahun 2020 sebesar 66,94, Tahun 2020 sebesar 67,31, Tahun 2021 sebesar 67,72 dan Tahun 2022 sebesar 68,31. Dari tahun ke tahun, nilai IPM Kabupaten Takalar terus mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).



Foto : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar Muhammad Nurdin Kunjungan ke Sekolah mengecek kesiapan sekolah dan tenaga pendidik. (Disdikbud 2022)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Takalar menempati peringkat kedua puluh dua di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia meningkat di Kabupaten Takalar dengan adanya Gerakan Ayo Kembali Bersekolah dan Sekolah Ramah Anak yang di laksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sejak tahun 2019 sampai sekarang.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

a. Perbandingan antara target dan realisasi.

Tabel III.7

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,20	67,64	96,35

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja pada sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat berhasil mencapai kriteria Sangat Tinggi (ST).

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
1.	Angka Harapan Hidup	67,18	67,30	67,64

Berdasarkan tabel perbandingan capaian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dari pada sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, tiap tahunnya mengalami peningkatan.

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan RPJMD.

Tabel. III.9
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,20	67,64	96,35

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir RPJMD 2017-2022 sehingga target tahun 2022 merupakan kondisi akhir yang diharapkan sesuai dengan RPJMD. Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja tahun 2022 dengan target RPJMD pada sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat walaupun belum mencapai target kondisi akhir RPJMD yang di harapkan namun berhasil mencapai kriteria capaian Sangat Tinggi (ST).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah selama ini. Diantaranya dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar semua anggota keluarga berperilaku hidup sehat dan penyediaan berbagai fasilitas umum seperti puskesmas, posyandu, poskesdes dan lain – lain.

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan suatu wilayah adalah angka harapan hidup sebagaimana indikator kinerja pada sasaran 2. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Takalar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan di Kabupaten Takalar semakin membaik. Sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang derajat kehidupan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dalam pelayanan kesehatan penduduk menjadi suatu keharusan.

Pada bulan Mei 2022 Bupati Takalar H. Syamsari, S.Pt, MM meresmikan Gedung Stroke Center dan Cardiovasculer Care Unit (CVCU), Gedung ini diharapkan mampu menekan angka kematian akibat penyakit stroke di Kabupaten Takalar.



Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (2022) " Peresmian Gedung Stroke Center dan CVCU "

Kesehatan balita merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Artinya bahwa, suatu bangsa akan dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik apabila tingkat kesehatan balita memiliki angka yang baik pula. Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, keluarga, atau lainnya.



Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (2022) " Peresmian Gedung PONED PKM Polsel"

Di Kabupaten Takalar, peran tenaga medis dalam proses kelahiran bayi sudah sangat tinggi. Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis, seperti dokter kandungan dan bidan pada proses kelahiran hampir mencapai 100 persen. Peran tenaga bukan medis (dukun/ tenaga tradisional dan lainnya) sebagai penolong terakhir kelahiran dapat dikatakan tidak ada lagi. Upaya Pemerintah Kabupaten Takalar dapat dilakukan untuk memperkecil angka persalinan oleh tenaga non medis adalah dengan meningkatkan jumlah bidan dan menempatkan mereka di puskesmas/pustu di wilayah perdesaan.

Dalam rangka mendukung program penurunan angka kematian ibu hamil dan bayinya Pemerintah Kabupaten Takalar pada tahun 2022 meresmikan 11 Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesman dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di RSIB Zainab.



Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (2022) " Peresmian Gedung NICU RSIB ZAINAB di Galesong Utara"

Berdasarkan Data Statistik Sektoral Kabupaten Takalar, Pada tahun 2022 di Kabupaten Takalar terdapat 3 rumah sakit umum daerah, 1 Rumah Sakit Khusus, 13 Puskesmas Rawat Inap, 3 Puskesmas Non Rawat Inap, 16 Puskesmas Keliling, 53 Puskesmas Pembantu, 41 Rumah Bersalin/BIdan Praktek Swasta, 6 Klinik Pratama, 7 Praktek Dokter Umum Perorangan dan 3 Praktek Dokter Gigi Perorangan.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Produktivitas SDM Masyarakat

a. Perbandingan antara target dan realisasi.

Tabel III.10

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2	2,63	61,53

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja pada sasaran 3 Meningkatnya Produktivitas SDM Masyarakat

masuk dalam kategori Tinggi (T) dengan capaian kinerja sebesar 61.53 dari target tahun 2022.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.11
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,16	3,93	2,63

Berdasarkan tabel perbandingan capaian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dari pada sasaran 3 Meningkatnya Produktivitas SDM Masyarakat, mengalami penurunan pada setiap tahunnya walaupun jumlah penurunannya belum memenuhi target capaian tiap tahunnya, namun untuk tahun 2022 penurunan tingkat pengangguran terbuka sangat signifikan dimana tahun 2021 sejumlah 3,93% menurun menjadi 2,63% di tahun 2022.

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan RPJMD.

Tabel. III.12
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2	2,63	76,04

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja tahun 2022 sebagai kondisi akhir yang diharapkan opada RPJMD 2017-2022 pada sasaran 3 Meningkatnya Produktivitas SDM Masyarakat masih berada pada kriteria Tinggi (T)

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Capaian tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Takalar pada tahun 2022 (berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan angka absolut jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar) diperoleh hasil sebesar 2,63% menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,93% sehingga terjadi penurunan sebesar 1,3%.



Sumber : UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar (2022)

Keberhasilan pemerintah Kabupaten Takalar menurunkan jumlah Pengangguran yaitu dengan mengoptimalkan peran dan fungsi UPT Balai Latihan Kerja Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja Transmigrasi yang secara aktif melakukan pelatihan – pelatihan bagi pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi

mereka agar bisa terserap di lapangan pekerjaan ataupun membangun bisnis UMKM sendiri.

Pelatihan – pelatihan yang dilakukan oleh UPT Balai Latihan Kerja ini merupakan pelatihan untuk kompetensi yang memang banyak di butuhkan di lapangan kerja maupun sebagai modal dasar untuk membuka usaha bagi pada alumninya, pelatihan tersebut antara lain adalah Tata Kecantikan, Otomotif, Menjahit, Komputer dan Instalasi Kelistrikan.



Foto : Kegiatan Pelatihan di BLK Takalar (UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar – 2022)

Usaha yang dilakukan BLK Kabupaten Takalar guna membekali para pencari kerja dengan kompetensi – kompetensi ini belum cukup maksimal menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Takalar sebagaimana target RPJMD hal ini dikarenakan belum tersosialisasikannya program – program pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK ke seluruh masyarakat khususnya para pencari kerja, hal ini juga dikarenakan kurangnya

kesadaran dan motivasi para pencari kerja untuk mengikuti pelatihan tersebut.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Masyarakat

a. Perbandingan antara target dan realisasi.

Tabel III.13

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PDRB / Kapita	Juta	40	40,18	100,45
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,54	4,64	61,53

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja pada sasaran 4 Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Masyarakat untuk Indikator 1 PDRB/Kapita mencapai realisasi kinerja lebih dari target yang di rencanakan di RPJMD dengan capaian sebesar 100,45% atau dengan kata lain capaian Sangat Tinggi (ST) sedangkan untuk Indikator 2 Pertumbuhan Ekonomi masuk dalam kategori Rendah (R).

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.14
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
1.	PDRB / Kapita	34,03	36,76	40,18
2.	Pertumbuhan Ekonomi	-0,61	5,05	4,64

Berdasarkan tabel perbandingan capaian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dari pada sasaran 4 Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Masyarakat, untuk indikator 1 PDRB/Kapita setiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan untuk indikator 2 Pertumbuhan Ekonomi capaiannya fluktuatif dikarenakan tahun 2020 menurun kemudian tahun 2021 kembali

mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan.

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan RPJMD.

Tabel. III.15
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	PDRB/Kapita	Juta	40	40,18	100,45
2.	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,54	4,64	61,53

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja tahun 2022 yang merupakan kondisi akhir yang diharapkan di RPJMD pada sasaran 4 Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Masyarakat indikator pertama telah berhasil melewati kondisi akhir yang ditargetkan pada RPJMD dengan capaian 100,45 kategori Sangat Tinggi (ST) sedangkan indikator kedua Pertumbuhan Ekonomi belum berhasil mencapai kondisi akhir yang di harapkan RPJMD dengan capaian kinerja hanya 61,53% kategori Sedang (S).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas Perekonomian Takalar pada Tahun 2022 mengalami penurunan dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2021, hal ini dikarenakan data pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar merupakan data sementara yang belu rampung perhitungannya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada bulan April Tahun 2022 PDRB atas dasar harga berlaku (Hb) Tahun 2017 - 2021 mengalami kenaikan per tahun yaitu dari Rp 8.559,00 milyar pada Tahun 2017 menjadi Rp 11.126,11 milyar pada Tahun 2021. Selama Tahun 2017 - 2022, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontrubusi yang besar yaitu sebesar Rp. 4.326,52 milyar (50,55%) Tahun 2017 dan mengalami peningkatan sampai Tahun 2020 sebesar Rp. 5.033,40 milyar (49,55%), sementara Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 5.019,28 milyar (49,11%) dan kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 5.699,39 (51,23%).

Sektor kedua terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda memberikan kontribusi Tahun 2017 sebesar Rp. 999,49 milyar (11,68%) mengalami peningkatan sampai Tahun 2022 menjadi sebesar Rp.1.340,95 milyar (12,05%), sementara kontribusi terkecil adalah sektor Jasa Perusahaan Tahun 2017 sebesar Rp. 0,48 milyar (0,01%) sementara Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 0,59 milyar (0,01), ini menunjukkan bahwa sumber daya ekonomi yang dihasilkan Kabupaten Takalar berasal dari sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan.

5. Sasaran 5 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian

a. Perbandingan antara target dan realisasi.

Tabel III.16

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kontribusi Pertanian, Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	7,81	10,20	130, 60

2	Kontribusi Peternakan terhadap PDRB	%	9,81	3,6	36,69
3	Kontribusi Perikanan terhadap PDRB	%	13,76	N/A	N/A
4	Kontribusi Industri terhadap PDRB	%	6,29	4,81	76,47
5	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	9,89	12,05	121,84

Belum dapat dilakukan pengukuran realisasi indikator kinerja pada sasaran 5 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor – Sektor Perekonomian untuk indikator Kontribusi Pertanian Tanaman Pangan terhadap PDRB dengan persentase capaian sebesar 130,60 masuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi (ST), Indikator Kontribusi Peternakan terhadap PDRB dengan capaian kinerja 36,69% masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR), Indikator Kontribusi Perikanan terhadap PDRB belum dapat dihitung capaiannya karena sampai saat laporan ini disusun Perangkat Daerah penanggung jawab belum memasukkan data capainnya, Indikator Kontribusi Industri terhadap PDRB dengan capaian kinerja sebesar 76,47% masuk kedalam kategori capain Tinggi (T) dan yang terakhir indikator Kontribusi perdagangan terhadap PDRB masuk kedalam kategori Sangat Tinggi (ST) dengan persentase capaian kinerja sebanyak 121,84%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.17
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
1	Kontribusi Pertanian, Tanaman Pangan terhadap PDRB	N/A	N/A	10,20
2	Kontribusi Peternakan terhadap PDRB	N/A	N/A	3,6
3	Kontribusi Perikanan terhadap PDRB	N/A	N/A	-
4	Kontribusi Industri terhadap PDRB	5,07	4,81	4,81
5	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	12,37	12,05	12,05

Berdasarkan tabel perbandingan capaian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 untuk indikator 1 sampai dengan 3 belum dapat dibandingkan setiap tahunnya karena tidak tersedianya data tahun 2020 dan 2021, untuk indikator 4 Kontribusi Industri terhadap PDRB mengalami penurunan dari di tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 belum terlihat terjadinya peningkatan dikarenakan data yang ada merupakan data sementara yang belum mengakomodir keseluruhan data di tahun 2022, sedangkan untuk indikator 5 kontribusi perdagangan terhadap PDRB relative terjadi peningkatan setiap tahunnya.

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan RPJMD.

Tabel. III.18
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1	Kontribusi Pertanian, Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	7,81	10,20	130,60
2	Kontribusi Peternakan terhadap PDRB	%	9,81	3,6	36,69
3	Kontribusi Perikanan terhadap PDRB	%	13,76	N/A	N/A
4	Kontribusi Industri terhadap PDRB	%	6,29	4,81	76,47
5	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	9,89	12,05	121,84

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja tahun 2022 dengan target kondisi akhir RPJMD tahun 2022 pada sasaran 5 untuk indikator 1 kontribusi pertanian terhadap PDRB walaupun data yang disajikan pada saat laporan ini disusun merupakan data sementara capaiannya sudah jauh melebihi kondisi akhir di tahun 2022 yang di harapkan dengan capaian sebesar 130,60% , begitu pula dengan indikator 5 Kontribusi

Perdagangan terhadap PDRB dengan capaian sebesar 121,84%. Sedangkan untuk indikator 2 sampai dengan 4 dengan data yang masih bersifat sederhana masih terlihat jauh dari kondisi akhir RPJMD yang diharapkan di tahun 2022.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas dapat dikatakan bahwa untuk Indikator Pertama Kontribusi Pertanian dan Tanaman Pangan terhadap PDRB capaiannya telah melebih tarket kondisi akhir yang telah di tetapkan pada RPJMD 2017-2022 dengan capaian 130,60% beberapa faktor diantaranya peningkatan sarana dan prasarana pertanian yang mendukung peningkatan produksi tanaman pangan seperti pengembangan sumber-sumber air. Ini meliputi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengadaan pompanisasi yaitu irigasi air tanah dangkal, pembangunan embung dan lain sebagainya.



Foto : Pengembangan sumber-sumber air untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan (DTPHPKP Kab. Takalar - 2022)



Foto : Pengembangan sumber-sumber air untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan (DTPHPKP Kab. Takalar - 2022)

Selain itu adanya beberapa lokasi yang melakukan penanaman padi dengan IP 300, selain itu peningkatan pengetahuan petani dalam bercocok tanam dengan menggunakan benih bersertifikat serta penanganan tanaman dengan penggunaan pupuk dan penaggulangan hama dan penyakit tumbuhan yang memadai. Kegiatan kegiatan tersebut dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan di tahun 2022 yang merupakan salah satu upaya mewujudkan visi dan misi pertanian di Kabupaten Takalar melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, pengaturan pola tanam melalui pola intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi serta pemberian bantuan berupa pengadaan alsintan dan bibit serta ditunjang perbaikan sarana irigasi, jalan pertanian dan sebagainya.



Foto : Peninjauan Gudang Untuk Penerbitan NIB (Disperindag Kab. Takalar 2022)

Untuk indikator kelima kontribusi perdagangan terhadap PDRB, melalui Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dan sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dan sub kegiatan diharapkan mampu dan dapat mencapai target, Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran dalam APBD Dana Alokasi Umum.



Foto : Pendataan Bahan Pokok di Pasar Sentral Pattallassang Kab. Takalar (Disperindag Kab. Takalar 2022)

6. Sasaran 6 : Berkurangnya Beban Hidup Masyarakat Lapis Bawah

a. Perbandingan antara target dan realisasi.

Tabel III.19

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penduduk diatas Garis Kemiskinan	%	92,35%	98%	106,11

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja pada sasaran 6 Berkurangnya Beban Hidup Masyarakat Lapis

bawah mencapai kriteria Sangat Tinggi (ST) dengan capaian realisasi sebanyak 106,11%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.20
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
1.	Penduduk diatas Garis Kemiskinan	91,3	91,75	98

Berdasarkan tabel perbandingan capaian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dari pada sasaran 6 Berkurangnya Beban Hidup Masyarakat Lapis Bawah setiap tahunnya mengalami kenaikan, bahkan untuk capaian 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2021 yaitu naik sebanyak 6,25%.

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan RPJMD.

Tabel. III.21
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Penduduk diatas Garis Kemiskinan	%	92,35	98	106,11

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja tahun 2022 dengan target RPJMD pada sasaran 6 Berkurangnya Beban Hidup Masyarakat Lapis Bawah telah melampaui target kondisi akhir RPJMD 2017-2022 dengan capaian sebesar 106,11%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Angka kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Takalar pada periode 2017 - 2022 mengalami penurunan tiap tahunnya, Tahun 2017 sebesar 9,24% (26,990 jiwa), turun menjadi 9% (26.570 jiwa) pada Tahun 2020. Selanjutnya kembali mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi 8,70% (25.930 jiwa), tahun 2020 menjadi 8,44% (25.380 jiwa) dan tahun 2021 juga menurun menjadi 8,25% (24.600 jiwa). Angka kemiskinan di Kabupaten Takalar menunjukkan tren yang menurun dalam kurun waktu 2017-2022. Peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sampai ke Pemerintah Desa sangat mendukung penurunan angka kemiskinan.





Foto : Pembagian BLT di Kecamatan Sanrobone Takalar (Dinsos PMD Kab. Takalar 2022)

Berbagai program dan kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat menekan peningkatan angka kemiskinan. Diantaranya Dana desa yang dialokasikan sejak tahun 2015 dan berbagai program social lainnya, dan Alokasi anggaran penanganan Covid 19 Tahun 2020 dalam bentuk Bantuan Sosial dan Pemulihan Ekonomi masyarakat.

7. Sasaran 7 : Berkurangnya Beban Hidup Masyarakat Lapis Bawah

a. Perbandingan antara target dan realisasi.

Tabel III.22

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Investasi PMDN	Jumlah	43.000.000.000	97.525.785.650	216,72
2	Nilai Investasi PMA	Jumlah	0	0	100

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja pada sasaran 7 Berkurangnya Beban Hidup Masyarakat Lapis bawah mencapai kriteria Sangat Tinggi (ST) dengan capaian realisasi diatas 100%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.23
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
1.	Nilai Investasi PMDN	117.148.000.000	58.572.000.000	97.525.785.650
2.	Nilai Investasi PMA	0	0	0

Berdasarkan tabel perbandingan capaian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi penuruan di tahun 2021 dengan Nilai Investasi PMDN sebanyak 58.572.000.000 untuk indikator kinerja pada sasaran 7 Berkurangnya Beban Hidup Masyarakat Lapis bawah.

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan RPJMD.

Tabel. III.24
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Nilai Investasi PMDN	Jumlah	45.000.000.000	97.525.785.650	216,72
2.	Nilai Investasi PMA	Jumlah	0	0	100

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja tahun 2022 dengan target kondisi akhir RPJMD pada sasaran 7 Berkurangnya Beban Hidup Masyarakat Lapis Bawah berada pada kriteria Sangat Tinggi dengan capaian yang sangat jauh dari target yaitu Nilai Investasi PMDN target kondisi akhir RPJMD adalah 45.000.000.000 namun capaian tahun 2022 sudah mencapai 97.525.785.620 dengan persentase capaian kinerja 216,72%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Jumlah nilai Investasi PMDN/PMA yang telah melampaui target di sebabkan karena dengan adanya sosialisasi OSS-RBA dan LKPM Online (Online Single Submission-Risk Basd Approach dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online) sudah tersediah sampai ke tingkat kelurahan dan desa dan dengan dukungan anggaran Dana DAK Non fisik sebagai pengawasan dan pemantauan terhadap para pelaku usaha.

OSS-RBA dan LKPM Online (Online Single Submission-Risk Basd Approach dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.





Foto : Pelaksanaan Bimtek OSS-RBA dan LKPM Online (Online Single Submission-Risk Basd Approach dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online) bagi Para Pelaku Usaha (DPMPTSPNakertrans – 2022)

8. Sasaran 8 : Terpeliharanya Daya Dukung Lingkungan bagi Keberlanjutan Pembangunan serta Penguatan Desa

a. Perbandingan antara target dan realisasi.

Tabel III.25

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penghargaan Lingkungan Hidup	Penghargaan	Adipura	Tidak Ada	0

Untuk Sasaran Terpeliharanya Daya Dukung Lingkungan Bagi Keberlanjutan Pembangunan serta Penguatan Desa, Indikator Pengharagaan Lingkungan Hidup Capaian yang menargetkan Adipuran namun realisasinya tidak ada penghargaan apapun sehingga Capaian Kinerjanya adalah 0%

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.26
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
1.	Penghargaan Lingkungan Hidup	Sertifikat Adipura	Tidak Ada	Tidak Ada

Berdasarkan tabel perbandingan capaian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dari sasaran Terpeliharanya Daya Dukungan Lingkungan bagi Keberlanjutan Pembangunan Serta Penguatan Desa Indikator Penghargaan Lingkungan Hidup untuk hanya mendapatkan penghargaan di Tahun 2020 yaitu Sertifikat Adipura.

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan RPJMD.

Tabel. III.27
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Penghargaan Lingkungan Hidup	Penghargaan	Adipura	Tidak Ada	-

Untuk Indikator Penghargaan Lingkungan Hidup sampai batas akhir RPJMD 2017-2022 Kabupaten Takalar belum berhasil memoeroleh penghargaan lingkungan hidup sesuai dengan target kondisi akhir yang di targetkan pada RPJMD 2017-2022.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan secara massive telah melakukan dan melaksanakan program dan kegiatan – kegiatan untuk mendukung ketercapaian indikator Penghargaan Lingkungan Hidup yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase Penurunan Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan capaian kinerja 69,44% dari target 100%. Pencapaian target ini dipengaruhi pada pelaksanaan pengadaan alat laboratorium yang diperlukan untuk beroperasionya laboratorium lingkungan. Dari target 35 alat yang terealisasi berjumlah 24 alat.
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan

Foto : Pengambilan Sample Air Sungai Takalar

Lingkungan Hidup (PPLH) dengan indikator Pembinaan usaha kegiatan terhadap pengawasan pengelolaan lingkungan dengan capaian kinerja 100,00% dari target 100,00%. Output yang dihasilkan program ini adalah kegiatan pengawasan ketaatan pengelolaan lingkungan bagi kegiatan/usaha dengan target 1 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Kegiatan yang dilaksanakan 1 (satu) kali tersebut karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan.

3. Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase Pengelolaan Sampah dengan capaian kinerja 100,00% dari target 100,00%. Pencapaian kinerja tersebut berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah 12 kegiatan dari bulan januari sampai bulan desember.



Foto : Armada Pengangkutan Sampah Kabupaten Takalar (DLHP Kab. Takalar 2022)

Program tersebut tetap dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar hanya untuk Penghargaan Adipura yang semestinya diterima di tahun 2022 pelaksanaan penilaiannya seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021, namun Lementerian Lingkungan Hidup belum melaksanakan kegiatan tersebut karena masih fokus pada penangangan pasca pandemic Covid-19.

4. **Sasaran 9 : Terpeliharanya Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam Bebasis Integrasi Ruang**

a. Perbandingan antara target dan realisasi.

Tabel III.28

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kepatuhan Terhadap RTRW	%	90	66,67	74,07

Untuk Sasaran Terpeliharanya Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam Bebasis Integrasi Ruang Indikator tingkat kepatuhan RTRW dari Target 90% dengan realisasi 66,67% sehingga capaian kinerja sejumlah 74,07% masuk dalam kategori Sedang (S).

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.29
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian		
		2020	2020	2022
1.	Tingkat Kepatuhan Terhadap RTRW	N/A	85,71	66,74

Berdasarkan tabel perbandingan capaian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan capaian kinerja Indikator Tingkat Kepatuhan Terhadap RTRW dari 85,71 di tahun 2021 menjadi 66,74 ditahun 2022.

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan RPJMD.

Tabel. III.30
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka	Rata Rata Realisasi Sampai	Capaian (%)

			Menengah	Dengan Tahun ini	
1.	Tingkat Kepatuhan Terhadap RTRW	%	90	66,67	74,07

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir berlakunya RPJMD sehingga apabila dilihat dari capaian indikator Tingkat Kepatuhan Terhadap RTRW yang hanya 66,67% dari target yang diharapkan dikondisi akhir RPJMD sebesar 90% tentu capaian ini masih jauh dari yang ditargetkan di RPJMD dengan persentase capaian kinerja 74,07% masuk dalam kategori capaian kinerja sedang (S).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan data capaian kinerja yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat terjadi penurunan capaian kinerja untuk Indikator Tingkat Kepatuhan terhadap RTRW dari 85,71 di tahun 2021 menjadi 66,74 ditahun 2022, hal ini terjadi karena Dokumen RTRW baru rampung penyusunannya di tahun 2022, sehingga untuk pengukuran kepatuhannya tidak bisa dilaksanakan secara maksimal di tahun 2022 yang mengakibatkan rendahnya data capaian yang diperoleh.



Foto : Bupati Takalar menyerahkan Ranperda Revisi RTRW ke Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar (Humas Kab. Takalar 2022)





5. Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi.

Tabel III.31

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Membangun Desa	Indeks	0,6474	0,6809	105,17

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja pada sasaran 10 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan mencapai indikator Sangat Tinggi (ST) dengan capaian sebesar 105,17% dari target kinerja.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.32
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
1.	Indeks Membangun Desa	0,6572	0,6710	0,6809

Berdasarkan tabel perbandingan capaian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dari pada sasaran 10 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2020.



c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan RPJMD.

Tabel. III.33
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Membangun Desa	Indeks	0,6474	0,6809	105,17

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja tahun 2022 dengan target Kondisi Akhir RPJMD pada sasaran 10 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan berada pada Sangat Tinggi (ST) karena tingkat capaian kinerja telah melebihi target Kondisi Akhir RPJMD yaitu sebanyk 105,17% dari target RPJMD.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman), Indeks Ketahanan Ekonomi (Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangngan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah), Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan (Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana). Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam

kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Jumlah desa keseluruhan di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2022 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Desa. pada tahun 2022, hanya tersisa empat desa tertinggal yaitu Desa Balang Datu, Mattiro Baji, Desa Rewataya dan Desa Tompo Tanah dimana keseluruhan desa tersebut berada diwilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke salah satu kecamatan di Kabupaten Takalar yang secara kelembagaan baru terbentuk di tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan jumlah desa tertinggal yang tersisa 4 (empat) Desa, maka jumlah desa yang masuk kategori maju di Kabupaten Takalar jumlah nya jauh lebih banyak yaitu sebanyak 14 Desa, dan desa lainnya masuk dalam kategori desa berkembang (Hasil Penilaian Status IDM Desa terlampir).

Sehingga apabila di Persentasekan terdapat 5,26% desa tertinggal, 18,42% desa maju, dan 76,32% desa berkembang sehingga secara keseluruhan rata – rata nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Takalar adalah 0,6809 masuk dalam kategori berkembang dan berada di urutan 235 dari seluruh kabupaten di Indonesia.



Foto : Bupati Takalar memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Tahun 2022 di Baruga Imanindori Kantor Bupati Takalar (Bagian Protpim Takalar – 2022)

Adapun program – program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Takalar demi mendukung upaya pembangunan desa adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan rutin melaksanaankan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendampingan Penyusunan RPJMDes yang di fasilitasi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappelitbangda dan Bagian Hukum Setda.



Foto : Bimtek Penyusunan RPJMDes Desa Su'rulangi 8 Februari 2022
(Bappelitbangda Kab. Takalar – 2022)

Sekretaris Daerah Takalar,H. Muhammad Hasbi, S.STP, M.AP menginstruksikan untuk program prioritas dalam penggunaan dana desa untuk tahun 2022 dimana 40% diperuntukkan untuk perlindungan sosial berupa BLT, 20% untuk program ketahanan pagan dan hewan, 8% pendanaan covid dan 32% untuk sektor prioritas lainnya yang dirancang dan disepakati oleh desa.

Pada September Tahun 2022 melalui Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 145/9781/DPMD Perihal Penyampaian Kode Desa, 10 Desa yang sebelumnya berstatus desa persiapan yaitu Desa Kale Lantang di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Desa Kanaeng di Kecamatan Galesong Selatan, Desa Maccini Sombala, Desa Sawakung Beba, Desa Biring Kassi, Desa Kabbalokang Pakabba di Kecamatan Galesong Utara, Desa Galesong Timur, Desa Kampung Beru, Desa Tarembang di

Kecamatan Galesong, dan Desa Minasa Baji di Kecamatan Kepulauan Tanakeke telah ditetapkan menjadi desa.

6. Sasaran 12 : Meningkatnya Martabat Tatanan Sosial Kemasyarakatan

a. Perbandingan antara target dan realisasi.

Tabel III.34

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rumah Layak Huni	%	28	32,59	108,63
2	Permukiman Kumuh	%	12	16,40	60,97

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja pada sasaran 12 Meningkatnya Martabat Tatanan Sosial Kemasyarakatan untuk indikator pertama mencapai capain sangat tinggi (ST) sedangkan untuk indikator kedua masih berada pada capaian Rendah (R).

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.35
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian		
		2020	2020	2022
1.	Rumah Layak Huni	N/A	21,96	32,59
2.	Permukiman Kumuh	N/A	20	16,40

Berdasarkan tabel perbandingan capaian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dari pada sasaran 12 Meningkatnya Martabat Tatanan Sosial Kemasyarakatan terjadi perbaikan dan kenaikan capaian pada setiap indikatornya mulai tahun 2020 sampai dengan 2022.

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan RPJMD.

Tabel. III.36
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Rumah Layak Huni	%	32	32,59	101, 84
2.	Permukiman Kumuh	%	8	16,40	48,78

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja tahun 2020 dengan target RPJMD pada sasaran 12 Meningkatnya Martabat Tatanan Sosial Kemasyarakatan untuk indikator 1 mencapai kategori Sangat Tinggi (S), sedangkan untuk indikator 2 masuk dalam kategori sangat rendah (SR).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat. Rumah juga berfungsi sebagai sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Kualitas lingkungan rumah tinggal berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya.

Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah.



Foto : Pembangunan Rumah Layak Huni
(Dinas PUTRPKP 2022)

Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang

digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan hanya ada pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.804 rumah sementara jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni sebanyak 588 rumah tangga (32,59%). Sementara untuk tahun 2022 belum pernah ada kegiatan pemerintah terkait relokasi. intervensi penanganan luasan kumuh di bawah 10 ha yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan SK Bupati Takalar tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukinan kumuh secara keseluruhan yaitu sebesar 110,65 ha belum ada yang tertangani.



Foto : Papan Informasi Program KOTAKU
(Dinas PUTRPKP 2022)

Penanganan/intervensi kawasan kumuh pada tahun 2022 dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Takalar yang awalnya seluas 43,10 ha membantu menangani dua (2) kelurahan yaitu Kelurahan Pattalassang awalnya luasnya 26,22 ha setelah intervensi program KOTAKU menjadi 16,57 ha dan Kelurahan Pallantikang awalnya 40,43 ha setelah intervensi KOTAKU menjadi 32,93 ha. Persentase jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kabupaten Takalar selama periode 2017 2022 mengalami penurunan dari tahun ke tahun . Pada tahun 2022, persentase jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 8,52% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 10,94%. Hal ini disebabkan karena adanya dana APBN berupa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang banyak berkontribusi mengurangi kriteria Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di Kabupaten Takalar.

7. Sasaran 15 : Meningkatnya Kualitas Ketertiban, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat

a. Perbandingan antara target dan realisasi.

Tabel III.37

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	%	98	100	102,04
2	Tingkat Waktu Tanggap	%	98	100	102,4

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja pada sasaran 15 Meningkatnya Kualitas Ketertiban, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat untuk indikator pertama Angka Gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

mencapai capaian Sangat Tinggi (ST) untuk seluruh indikator dengan capaian 102,4% dari target kinerja tahun 2022.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.38
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
1.	Angka Gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	98	99,5	100
2.	Tingkat Waktu Tanggap	90	88,98	100

Berdasarkan tabel perbandingan capaian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dari pada sasaran 15 Meningkatnya Kualitas Ketertiban, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan RPJMD.

Tabel. III.39
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Angka Gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat yang tertangani	%	98	100	102,04
2.	Tingkat Waktu Tanggap	%	98	100	102,4

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja tahun 2020 dengan target RPJMD pada sasaran 15 Meningkatnya Kualitas Ketertiban, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat

mencapai kriteria Sangat Tinggi (ST) dengan capaian 102,4% dari target kinerja kondisi akhir yang di rencanakan di RPJMD 2017-2022.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 % dari target dengan realisasi fisik mencapai 99,21%.

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan dan 8 indikator :

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 100 % dari target dengan realisasi fisik mencapai 99,80 %.
2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada sebesar 100 % dari target dengan realisasi fisik mencapai 0 %.
3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 100 % dari target dengan realisasi fisik mencapai 100 % .



Foto : Kepala Bidng Linmas melakukan Pemantauan dan Pengamanan Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2022 (Satpol PP Damkar Penyelamatan Kab. Takalar – 2022)

4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 100 % dari target dengan realisasi fisik mencapai 99.90 %.



Foto : Anggota Satpol PP Damkar Kab. Takalar melakukan Pengamanaan Unjuk Rasa di Kantor Bupati Takalar (Satpol PP Damkar Penyelamatan Kab. Takalar 2022)

5. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia sebesar 100 % dari target dengan realisasi fisik mencapai 0 %.
6. Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamong Praja sebesar 100 % dari target dengan realisasi fisik mencapai 0 %.
7. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 100 % dari target dengan realisasi fisik mencapai 99.04 %.
8. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 100 % dari target dengan realisasi fisik mencapai 0 %.

Tingkat Waktu Tanggap berhasil mencapai capaian kinerja yang Sangat Tinggi (ST) dengan capaian 102,4% Capaian ini berhasil melebihi target dengan melaksanakan beberapa

program penanggulangan kebakaran yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota mencapai 95,54 %. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan dan 5 indikator :
   a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 % dari target dengan realisasi fisik mencapai 99,98 %.
   b. Pengadaan pakaian dan alat perlengkapan khusus dan proteksi diri anggota pemadam kebakaran dengan 100 % dari target rencana dengan realisasi fisik mencapai 0 %.
   c. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan 100 % dari target rencana dengan realisasi fisik mencapai 93,92 %.
   d. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dengan 100 % dari target rencana dengan realisasi fisik mencapai 100 %.
   e. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan 100 % dari target rencana dengan realisasi fisik mencapai 0 %.



Foto : Upaya Penanganan Kebakaran di Kabupaten Takalar (Satpol PP Damkar Penyelamatan Kab. Takalar 2022)

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran mencapai 0 %. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan dan 2 indikator :
   a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran sebesar 100 % dari target dengan realisasi fisik mencapai 0 %.
   b. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan 100 % dari target rencana dengan realisasi fisik mencapai 0 %.
3. Investigasi Kejadian Kebakaran mencapai 0 %. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan dan 1 indikator :
   a. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran sebesar 100 % dari target dengan realisasi fisik mencapai 0 %.
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran mencapai 0 %. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan dan 1 indikator :
   b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat sebesar 100 % dari target dengan realisasi fisik mencapai 0 %.



Foto : Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Satpol PP Damkar Penyelamatan Kab. Takalar 2022)



Foto : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kab. Takalar memberikan materi pada acara In House Training Penaggulangan Kebakaran. (Satpol PP Damkar Penyelamatan Kab. Takalar 2022)



Foto : Anggota Damkar Kab. Takalar mengarahkan peserta In House Training Penaggulangan Kebakaran. (Satpol PP Damkar Penyelamatan Kab. Takalar 2022)

9. Sasaran 16 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, Demokratis, dan Terpercaya.

a. Perbandingan antara target dan realisasi.

Tabel III.40

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (80-90)	C (54,92)	68,65
2	Nilai SAKIP	Nilai	BB (80-90)	B (61,45)	76,81
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	100

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja pada sasaran 16 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang

Efektif, Bersih, Akuntabel, Demokratis dan Terpercaya Indikator Indeks Reformasi Birokrasi capaian 68,65% Kategori Sedang (S), Nilai SAKIP B Capaian 76,81 kategori Tinggi (T), sedangkan Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan mencapai 100% kategori Sangat Tinggi (ST).

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.41
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC
2.	Nilai SAKIP	CC	B	B
3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP

Berdasarkan tabel perbandingan capaian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dari pada sasaran 16 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, Demokratis dan Terpercaya seluruh indikator telah mengalami peningkatan predikat sejak tahun 2020 sampai dengan 2022,

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan RPJMD.

Tabel. III.42
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	A	C (54,92)	68,65
2.	Nilai SAKIP	Nilai	A	B (61,45)	76,81
3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	100

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja tahun 2022 dengan target RPJMD pada sasaran 16 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, Demokratis dan Terpercaya untuk Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP belum berhasil mencapai target akhir RPJMD Tahun 2017-2022 sedangkan untuk Indikator Opini BKP atas Laporan Keuangan telah mencapai kondisi akhir RPJMD 2017-2022 dengan capaian 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Untuk persoalan akuntabilitas kinerja, 100 % SKPD telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dengan tepat waktu. Meskipun demikian, kualitas perencanaan dan pelaporan harus lebih ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap menjaga konsistensi program yang terdapat pada Renstra SKPD dengan program yang terdapat pada RPJMD Kabupaten. Terkendalanya pelaporan baik itu laporan keuangan, LKj, LPPD dan sebagainya biasanya terjadi karena terlambatnya pengumpulan data primer maupun data pendukungnya sehingga proses pemasukan data juga terlambat.

Untuk Indeks Reformasi Birokrasi belum dapat mencapai target RPJMD 2017-2022 karena evidence dalam pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) belum maksimal pemenuhannya baik untuk tataran unit kerja ataupun di level kabupaten. Namun apabila dilihat dari Hasil Evaluasi yang dikeluarkan Oleh KemenPAN – RB terlihat kenaikan nilai Indeks RB yang cukup signifikan yaitu 5,47 pada tahun 2022, dimana nilai RB tahun 2021 hanya 49,45 dan naik menjadi 54,92 di Tahun 2022, hal ini dikarenakan peran aktif Inspektorat

Daerah dan Bagian Organisasi pada saat pengisian dan pemenuhan evidence PMPRB Tahun 2022.



Foto : Pelaksanaan Bimtek Penyusunan LKJ dan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Takalar di Hotel Almadera Makassar 25-27 Februari 2023. (Bagian Organisasi – 2022)

Seperti halnya Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP juga belum mampu mencapai target kondisi akhir RPJMD 2017-2022 hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Takalar tidak melakukan revisi RPJMD yang menjadi rekomendasi KemenPAN-RB pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.

Namun apabila melihat capaian nilai SAKIP setiap tahunnya mengalami peningkatan teruta di Tahun 2021 dan tahun 2022 yang sudah berhasil meraih predikat B, hal ini menandakan bahwa implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Kabupaten Takalar sudah baik pada tingkat pemerintah daerah

dan sebagian unit kerja kluster utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.



Foto : Bupati Takalar menerima penghargaan atas Akuntabilitas Kinerja Predikat B pada 5 April 2022 di Jakarta (Humas Kab. Takalar 2022)

Keberhasilan menaikkan nilai SAKIP Kabupaten Takalar menjadi predikat B dapat di capai dengan kolaborasi yang apik antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar, dengan Inspektorat Dearah dan Bagian Organisasi Kabupaten Takalar untuk mengawal dan mendampingi perangkat daerah dalam pelaksanaan implementasi SAKIP dan penyusunan dokumen SAKIP. Kemudian Bagian Organisasi selaku leading sektor pelaporan akuntabilitas secara aktif melakukan pembinaan dan pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah guna mendukung usaha peningkatan nilai implementasi SAKIP di Kabupaten Takalar.





Foto : Bupati Takalar menerima LHP BPK atas Laporan Keuangan Selasa 17 April 2022 di Makassar (Humas Kab. Takalar – 2022)

Keberhasilan dalam memperbaiki laporan keuangan dan asset menjadi faktor penting dalam terpenuhinya pencapaian sasaran opini BPK. Adapun opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Takalar pada Tahun 2022 adalah WTP, seiring membaiknya tata kelola keuangan kabupaten Takalar selama periode Tahun Anggarah 2021. Tentu capaian opini BPK ini karena ikhtiar dan upaya keras dan komitmen yg tinggi dari seluruh Perangkat Daerah di Takalar terutama untuk penanganan asset-aset daerah. Capaian Opini WTP ini menjadi sangat istimewa karena untuk pertama kalinya dicapai sejak terbentuknya Kabupaten Takalar 63 Tahun yang lalu BPK Perwakilan Sulsel pun mengharapkan Pemerintah Kabupaten Takalar dapat meningkatkan pengelolaan keuangannya di masa

mendatang dan senantiasa menggunakan sebesar-besarnya keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran 14 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik

a. Perbandingan antara target dan realisasi.

Tabel III.43

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	%	80	56,75	70,93
2	Capaian SPM Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban, Perumahan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	%	85	58,84	69,22

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja pada sasaran 17 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Seluruh Indikator masuk dalam kategori capaian Sedang (S) dengan indikator 1 capaian kinerja 70,93% kategori Sedang (S) dan Indikator 2 capaian kinerja 69,22%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.44
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian		
		2020	2020	2022
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	N/A	N/A	70,93
2.	Capaian SPM Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban, Perumahan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	75	68,93	58,84

Berdasarkan tabel perbandingan capaian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dari sasaran 17 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik belum dapat dilakukan pengukuran untuk indikator 1 dikarenakan tidak tersedianya data tahun – tahun sebelumnya, sedangkan untuk indikator 2 relatif terjadi penurunan setiap tahunnya.

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan RPJMD.

Tabel. III.45
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	%	80	56,75	70,93
2.	Capaian SPM Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban, Perumahan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	%	85	58,84	69,22

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja tahun 2020 dengan target RPJMD pada sasaran 17 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik seluruh indikator belum berhasil mencapai target kondisi akhir RPJMD tahun 2017-2022 karena capaiannya masih 70,93% dari target untuk indikator pertama dan 69,22% dari target untuk indikator kedua.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan diprioritaskan bagi warga Negara yang berhak untuk memperoleh pelayanan dasar tersebut. Jenis pelayanan Dasar yang berhak untuk diperoleh antara lain : pendidikan anak usia dini; pendidikan dasar; pendidikan kesetaraan; pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan bayi baru lahir; pelayanan kesehatan balita; pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human I m m u n o d e ficie n c y Vir u s); pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar

panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar disesuaikan dengan Standar Teknis yang diatur oleh Kementerian Teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar.

Yang membuat gagalnya pencapaian target penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2022 adalah adanya beberapa Jenis Pelayanan yang capaian SPM nya berpengaruh kepada nilai capaian secara keseluruhan.

Penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut di atas merupakan perwujudan upaya pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan. Tujuan Penerapan Standar Pelayanan Minimal juga sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan dasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Filosofi beserta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diuraikan di atas, yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal.

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Persentase efisiensi biaya = 100% - (Realisasi Biaya : Target Biaya x 100%)

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.1.393.781.496.949,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.1.534.891.281.980,00 Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase biaya pada level program adalah 9,19% dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp.141.109.785.031,-

D. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 secara garis besar terdiri dari tiga sektor yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Adapun laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022. Realisasi penggunaan Anggaran untuk pendapatan untuk pendapatan daerah tahun 2022 adalah Rp.1.127.947.965.954,10 dari anggaran sebesar Rp.1.507.476.990.366,77 atau realisasi sebesar 74,82% (sebagaimana terlampir dalam lampiran II).

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan skala peringkat nilai setiap indikator sasaran, dari 27 indikator maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Terdapat 14 Indikator Sasaran Strategis yang mendapatkan nilai Sangat Tinggi (ST).
b. Terdapat 4 Indikator Sasaran Strategis yang mendapatkan nilai Tinggi (T).
c. Terdapat 4 Indikator Sasaran Strategis yang mendapatkan nilai Sedang (S).
d. Terdapat 2 Indikator Sasaran Staretegis yang mendapat nilai Rendah (R).
e. Terdapat 2 Indikator Sasaran Strategis yang mendapatkan nilai Sangat Rendah (SR).
f. Dan Terdapat 1 Indikator yang belum dapat diukur capaiannya dikarenakan data capaian belum tersedia (N/A).

Capaian kinerja yang mencapai hasil yang diharapkan merupakan hasil kerja keras seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Takalar. Sedangkan indikator kinerja yang belum tercapai dapat memacu semangat kita untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencapai realisasi yang diharapkan. Terkait dengan indikator kinerja yang belum tercapai, amka strategi di masa mendatang yang perlu dilaksanakan adalah :

1. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja OPD tahun berjalan untuk memantapkan tahapan realisiai kinerja;

2. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berkala baik itu triwulan, semesteran dan tahunan;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja OPD secara berkala dan berkelanjutan;
4. Mengefektifkan dan mengefesiensikan penggunaan anggaran dengan membuat program-program yang prioritas dan menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.
5. Melakukan revisi RPJMD dan renstra OPD agar setiap program dari visi misi yang akan dicapai dapat terukur dan selaras satu sama lain.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Takalar ini dibuat sebagai penggambaran capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Takalar. Semoga Laporan ini dapat menjadi umpan balik bagi Pemerintah Kabupaten Takalar untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang sehingga pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA (LKJ)
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. SYAMSARI, S.Pt., M.M.**

Jabatan : **BUPATI TAKALAR**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mancapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Takalar, 10 Januari 2022

BUPATI TAKALAR

H. SYAMSARI, S.Pt., MM

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,30
		2	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	7,60
		3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,80
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,80
3	Meningkatnya Produktivitas SDM Masyarakat	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,10
4	Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Masyarakat	1	PDRB / Kapita	Juta	40
		2	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,54
5	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian	1	Kontribusi Pertanian, Peternakan, Perikanan PDRB	%	30,73
		2	Kontribusi Industri terhadap PDRB	%	6,24
		3	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	9,84
6	Berkurangnya Beban Hidup Masyarakat Lapis Bawah	1	Penduduk diatas Garis Kemiskinan	%	92
7	Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kerjasama Pembangunan Daerah	1	Nilai Investasi PMDN	Jumlah	44.000.000.000
		2	Nilai Investasi PMA	Jumlah	0
8	Terpeliharanya Daya Dukung Lingkungan bagi Keberlanjutan Pembangunan serta Penguatan Desa	1	Penghargaan Lingkungan Hidup	Penghargaan	Adipura
9	Terpeliharanya Daya Dukung Lingkungan dan Sumberdaya Alam Berbasis Integrasi Ruang	1	Tingkat Kepatuhan terhadap RTRW	%	80
10	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan	1	Indeks Membangun Desa	Indeks	0,6474
11	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dan Transportasi	1	Indeks Aksebilitas Infrastruktur	Indeks	N/A
12	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Permukiman dan Perumahan	1	Rumah Layak Huni	%	30
		2	Permukiman Kumuh	%	10
13	Meningkatnya Martabat Tatanan Sosial Kemasyarakatan	1	Penananganan Angka Kriminalitas	%	95
14	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keagamaan	1	Indeks Toleransi Kerukunan Beragama	Indeks	-
15	Meningkatnya Kualitas Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	1	Angka Gangguan Ketertiban, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	%	98
		2	Tingkat Waktu Tanggap	%	98
16	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, Demokratis, dan Terpercaya	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B
		2	Nilai SAKIP	Nilai	BB
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP
17	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	%	75
		2	Capaian SPM Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban, Perumahan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	%	80

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	261.609.920.166
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	75.200.791.656
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.875.006.194
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	377.992.256.580
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	139.978.189
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	227.967.925
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	574.999.771
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.535.780.244
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.250.876.394
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.898.569.200
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.145.542.222
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.971.299.426
13	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	34.999.790
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	439.999.320
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	33.408.721.298
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	168.845.114.680
17	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	590.706.255
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.841.568.785
19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	133.999.565
20	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.190.335.200
21	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	212.580.064
22	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.028.442.037
23	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.999.740
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.692.038.533
25	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.250.000.000
26	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	232.798.600
27	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	557.900.835
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.834.613.175
29	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	6.600.000
30	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	354.457.270
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	60.053.500
32	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	311.388.030
33	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	32.050.000

Dipindai dengan CamScanner

34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.451.813.172
35	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	102.999.800
36	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	30.735.500
37	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4.262.000
38	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	29.999.966
39	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	149.999.975
40	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	6.182.481.534
41	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	373.050.560
42	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	99.995.950
43	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	39.999.025
44	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.526.696.809
45	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.235.434.645
46	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	39.960.000
47	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.542.800.795
48	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	963.473.216
49	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	24.999.915
50	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	19.943.830
51	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.286.516.110
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.242.445.400
53	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	515.126.000
54	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	178.121.500
55	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	156.628.500
56	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	35.070.000
57	PROGRAM PENATAAN DESA	455.215.000
58	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1.000.000
59	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.133.586.500
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.256.747.500
61	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.796.194.605
62	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	340.423.985
63	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.479.199.000
64	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.132.900.000
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.255.121.420
66	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	16.346.165.643
67	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	24.999.200
68	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.211.277.063

Dipindai dengan CamScanner

69	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.567.156.547
70	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	183.759.853
71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.635.300.067
72	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	35.000.000
73	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	17.000.000
74	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	40.000.000
75	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	35.000.000
76	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	418.953.500
77	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	489.221.800
78	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	30.000.000
79	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	57.000.000
80	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	369.695.000
81	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	576.779.900
82	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.424.999.475
83	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000
84	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	149.999.930
85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50.000.000
86	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	232.609.354
87	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	10.300.000
88	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	235.693.000
89	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.721.081.315
90	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10.361.822.800
91	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	5.000.000
92	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	270.646.035
93	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	25.700.000
94	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	2.500.000
95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.706.099.478
96	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	7.047.373.790
97	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAY	2.681.118.425
98	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	280.930.403
99	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.042.760.478
100	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	679.935.000
101	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.133.965.564
102	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	99.870.070
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.224.028.595
104	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.013.946.861

Dipindai dengan CamScanner

105	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.779.744.794
106	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	319.999.389
107	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	170.002.871
108	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	249.999.725
109	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	399.999.660
110	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	866.921.424
111	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	21.600.000
112	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	25.000.000
113	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	49.550.000
114	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	25.000.000
115	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	18.900.000
116	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	8.749.300
117	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	8.121.950
118	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	8.118.790
119	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.282.181.634
120	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.750.000.000
121	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.849.999.840
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.618.208.539
123	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	8.790.776.500
124	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.749.732.736
125	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.047.125.145
126	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	591.571.655
127	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.419.239.228
128	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	148.015.458.163
129	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.328.105.645
130	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.689.045.905
131	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.409.781.975
132	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	512.016.140
133	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	441.175.000
134	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	804.900.215
135	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.735.654.131
136	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.036.390.000
137	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	345.240.000
138	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.987.926.874
139	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	118.572.787

Dipindai dengan CamScanner

140	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	450.618.904
141	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37.967.900
142	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.315.600
143	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.804.660
144	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.030.574.329
145	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	137.198.800
146	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.142.544.440
147	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	269.362.200
148	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	54.939.050
149	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	789.016.750

BUPATI TAKALAR

H. SYAMSARI, S.Pt., MM

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**					
3	Pendapatan Pajak Daerah	50.236.582.395,00	23.419.215.232,00	26.817.367.163,00	46,62	24.785.643.748,50
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.901.100.000,00	2.781.984.675,00	5.119.115.325,00	35,21	1.899.627.570,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.563.787.800,00	10.178.141.839,00	4.385.645.961,00	69,89	8.238.598.134,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	93.505.000.000,00	79.098.960.102,36	14.406.039.897,64	84,59	86.964.753.511,99
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**	**166.206.470.195,00**	**115.478.301.848,36**	**50.728.168.346,64**	**69,48**	**121.888.622.964,49**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER**					
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	24.918.050.000,00	15.697.095.747,00	9.220.954.253,00	62,99	17.475.180.893,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.692.997.000,00	12.729.294.165,00	(7.036.297.165,00)	223,60	7.700.344.503,00
13	Dana Alokasi Umum	564.598.728.000,00	559.979.921.190,00	4.618.806.810,00	99,18	564.934.568.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	240.506.057.000,00	217.862.168.873,00	22.643.888.127,00	90,58	198.365.000.034,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan**	**835.715.832.000,00**	**806.268.479.975,00**	**29.447.352.025,00**	**96,48**	**788.475.093.430,00**
16						
17	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**					
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian	75.045.028.000,00	66.115.702.400,00	8.929.325.600,00	88,10	84.350.371.400,00
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya**	**75.045.028.000,00**	**66.115.702.400,00**	**8.929.325.600,00**	**88,10**	**84.350.371.400,00**
21						
22	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.979.267.216,00	54.125.520.143,00	(6.146.252.927,00)	112,81	32.450.407.628,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Bantuan Keuangan	7.690.452.716,00	10.496.399.266,00	(2.805.946.550,00)	136,49	28.739.103.960,00
26	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi**	**55.669.719.932,00**	**64.621.919.409,00**	**(8.952.199.477,00)**	**116,08**	**61.189.511.588,00**
27	**Total Pendapatan Transfer**	**966.430.579.932,00**	**937.006.101.784,00**	**29.424.478.148,00**	**96,96**	**934.014.976.418,00**
28						
29	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**					
30	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000.000,00
31	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya	60.275.300.000,00	58.615.193.250,00	1.660.106.750,00	97,25	42.038.366.242,00
33	**Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah**	**60.275.300.000,00**	**58.615.193.250,00**	**1.660.106.750,00**	**97,25**	**45.788.366.242,00**
34						
35	**JUMLAH PENDAPATAN**	**1.192.912.350.127,00**	**1.111.099.596.882,36**	**81.812.753.244,64**	**93,14**	**1.101.691.965.624,49**
36						
37	**BELANJA**					
38	**BELANJA OPERASI**					
39	Belanja Pegawai	599.110.854.496,00	523.587.112.233,00	75.523.742.263,00	87,39	547.131.893.166,00
40	Belanja Barang	316.341.822.589,00	304.236.065.304,00	12.105.757.285,00	96,17	289.118.163.860,10
41	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Hibah	17.236.595.185,00	15.591.217.650,00	1.645.377.535,00	90,45	4.783.640.600,00
44	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Jumlah Belanja Operasi**	**932.689.272.270,00**	**843.414.395.187,00**	**89.274.877.083,00**	**90,43**	**841.033.697.626,10**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6	7
46						
47	**BELANJA MODAL**					
48	Belanja Tanah	4.621.467.838,00	4.576.325.420,00	45.142.418,00	99,02	8.577.959.400,00
49	Belanja Peralatan dan Mesin	89.077.186.249,00	77.491.881.979,00	11.585.304.270,00	86,99	29.661.741.430,00
50	Belanja Gedung dan Bangunan	188.808.174.077,00	180.038.642.251,00	8.769.531.826,00	95,36	50.781.476.803,72
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	172.932.782.056,00	155.024.484.196,00	17.908.297.860,00	89,64	47.170.806.203,38
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.502.191.901,00	1.293.334.640,00	3.208.857.261,00	28,73	3.590.120.350,00
53	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Jumlah Belanja Modal**	**459.941.802.121,00**	**418.424.668.486,00**	**41.517.133.635,00**	**90,97**	**139.782.104.187,10**
55						
56	**BELANJA TAK TERDUGA**					
57	Belanja Tak Terduga	4.047.507.689,00	3.919.474.976,00	128.032.713,00	96,84	123.652.909,00
58	**Jumlah Belanja Tak Terduga**	**4.047.507.689,00**	**3.919.474.976,00**	**128.032.713,00**	**96,84**	**123.652.909,00**
59						
60	**TRANSFER**					
61	**TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA**					
62	Bagi Hasil Pajak	3.646.694.400,00	3.804.817.225,00	(158.122.825,00)	104,34	0,00
63	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.695.125,00
64	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa**	**3.646.694.400,00**	**3.804.817.225,00**	**(158.122.825,00)**	**104,34**	**4.557.695.125,00**
66						
67	**TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN**					
68	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450.000,00
70	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa	134.566.005.500,00	124.218.141.075,00	10.347.864.425,00	92,31	142.439.366.107,00
71	**Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan**	**134.566.005.500,00**	**124.218.141.075,00**	**10.347.864.425,00**	**92,31**	**142.450.816.107,00**
72						
73	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER**	**1.534.891.281.980,00**	**1.393.781.496.949,00**	**141.109.785.031,00**	**90,81**	**1.127.947.965.954,20**
74						
75	**SURPLUS/DEFISIT**	**(341.978.931.853,00)**	**(282.681.900.066,64)**	**(59.297.031.786,36)**	**82,66**	**(26.256.000.329,71)**
76						
77	**PEMBIAYAAN**					
78	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
79	Penggunaan SiLPA	93.978.931.853,00	93.979.631.853,37	(700.000,37)	100,00	121.234.932.183,08
80	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	250.000.000.000,00	241.947.497.641,00	8.052.502.359,00	96,78	0,00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**	**343.978.931.853,00**	**335.927.129.494,37**	**8.051.802.358,63**	**97,66**	**121.234.932.183,08**
92						
93	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
94	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6	7
99	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**
106						
107	**PEMBIAYAAN NETTO**	**341.978.931.853,00**	**335.927.129.494,37**	**6.051.802.358,63**	**98,23**	**120.234.932.183,08**
108						
109	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**	**0,00**	**53.245.229.427,73**	**(53.245.229.427,73)**	**0,00**	**93.978.931.853,37**

Takalar, 17 Februari 2023

KEPALA BKAD

DAHLAN JALAMANG, S.PD, MM

NIP : 19730810 199802 1 003